

Tahun 2019



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM
DAN HAM JAWA TENGAH

Jalan Dr. Cipto No. 64 Semarang

 [badiklatkumhamjateng](#)

 [badiklatkumham.jateng](#)

 [badiklatjateng](#)

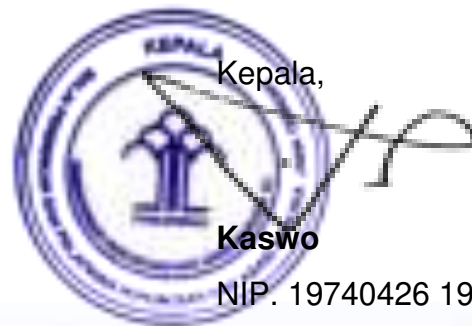
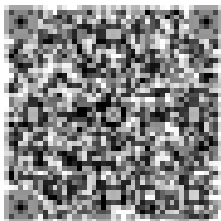


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala berkat dan rahmatNya sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah ini dengan baik. Laporan kinerja ini disusun untuk memberikan deskripsi dan paparan atas kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2019.

Laporan Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah ini menjelaskan tentang rencana dan capaian kinerja serta penyerapan anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2019 pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah ini kami sampaikan, semoga laporan ini bisa dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan Pimpinan untuk meningkatkan strategi dan target kinerja pada tahun 2020. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Kepala,

Kaswo

NIP. 19740426 199903 1 001

A close-up photograph of a pine cone resting on a wooden surface. The pine cone is illuminated from within, with several bright, glowing points of light that appear to be small LEDs or fiber optic lights. The background is dark and out of focus. A semi-transparent white horizontal band is overlaid across the middle of the image, containing the text.

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Salah satu unsur penting yang harus dimiliki dalam berdirinya suatu organisasi/instansi adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia inilah yang akan mengelola organisasi tersebut agar dapat terus berjalan dan berkembang. Namun agar dapat dikelola dengan baik maka diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah di bawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada para pegawai agar mempunyai kemampuan dan kompetensi yang baik di bidangnya masing-masing. Berdasarkan tugas tersebut maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah.



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah dimaksudkan sebagai wujud kewajiban Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

dalam melaksanakan sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi sarana penilaian dan perbaikan bagi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah di masa mendatang.

B. Tugas dan Fungsi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 04 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Divisi Administrasi. Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM mempunyai tugas menyelenggarakan

pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pelaksanaan tugas tersebut disesuaikan dengan wilayah kerjanya masing-masing. Saat ini telah dibentuk tiga Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM di Indonesia, yaitu Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah, dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara. Pembagian wilayah kerja dari masing-masing Balai Pendidikan dan Pelatihan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



No	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau	Batam, Kepulauan Riau	Provinsi : 1. Aceh 2. Sumatera Utara 3. Sumatera Barat 4. Sumatera Selatan 5. Riau 6. Kepulauan Riau 7. Jambi 8. Bangka Belitung
2	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah	Semarang, Jawa Tengah	Provinsi : 1. Jawa Tengah 2. D.I. Yogyakarta 3. Jawa Timur 4. Kalimantan Barat 5. Kalimantan Selatan 6. Kalimantan Tengah 7. Kalimantan Timur 8. Kalimantan Utara 9. Bali 10. Nusa Tenggara Barat 11. Nusa Tenggara Timur
3	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara	Bitung, Sulawesi Utara	Provinsi : 1. Sulawesi Selatan 2. Sulawesi Utara 3. Sulawesi Tengah 4. Sulawesi Tenggara 5. Sulawesi Barat 6. Gorontalo 7. Maluku 8. Maluku Utara 9. Papua 10. Papua Barat



Untuk melaksanakan tugas tersebut, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan rencana, program, dan anggaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
2. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
4. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah



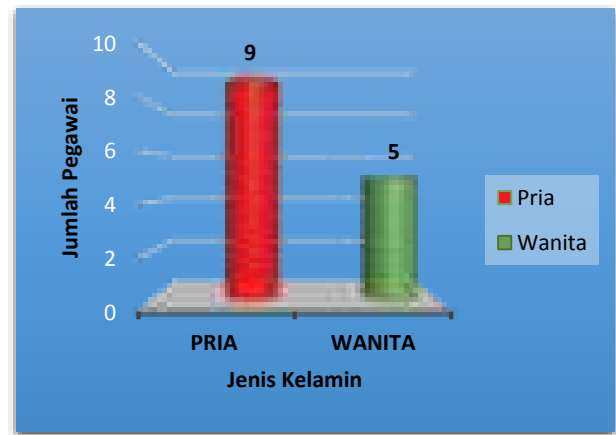


Struktur organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah terdiri dari :

1. 1 (satu) orang Kepala Balai Diklat;
2. 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha;
3. 2 (dua) orang Kepala Seksi :
 - Kepala Seksi Penyelenggaraan
 - Kepala Seksi Program dan Evaluasi

Jabatan	Jumlah
Eselon III	1 orang
Eselon IV	3 orang
JFU	6 orang
CPNS	3 orang
Tenaga Administrasi	1 orang
Jumlah	14 orang

Sebagaimana struktur organisasi di atas, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh 14 SDM yang terdiri atas 13 orang Pegawai Negeri Sipil dan 1 orang Tenaga Honorer dengan berbagai latar belakang pendidikan.



Grafik 1 : Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin (per 31 Desember 2019)



Grafik 2 : Jumlah pegawai berdasarkan jenjang pendidikan (per 31 Desember 2019)



Pembagian tugas dan wewenang Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, anggaran, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, tata kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi, hubungan masyarakat, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara, dan pengelolaan penerimaan negara

bukan pajak, serta urusan rumah tangga Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Seksi Program dan Evaluasi

Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan dan penyusunan rencana, program, dan kerja sama, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan diklat di wilayah.

3. Seksi Penyelenggaraan

Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan menyiapkan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

D. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, menyajikan informasi mengenai latar belakang penyusunan LKIP serta tugas, fungsi dan struktur organisasi Balai

Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah;

Bab II – Perencanaan Kinerja, menyajikan ringkasan mengenai perencanaan kinerja yang meliputi sasaran strategis, indikator kinerja utama, target dan program kerja, serta informasi mengenai anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan



HAM Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menyajikan ringkasan mengenai pengukuran kinerja dan penyerapan anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2019;

Bab IV – Penutup, menyajikan ringkasan mengenai tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Tahun Anggaran 2019 yang dirangkum ke dalam kesimpulan terhadap Akuntabilitas Kinerja serta Rencana Tindak Lanjut.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



Visi, Misi, dan Tata Nilai

Dalam melaksanakan tugas dan pembangunan di bidang hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai visi, misi, tujuan Dokumen Rencana Strategis Tahun 2015-2016. Tahun 2015-2019 diharapkan terjadi perubahan paradigma dalam hal mentalitas kemandirian, budaya kegotong royongan, dan budaya pelayanan. Adanya tuntutan perubahan paradigma tersebut, jika dielaborasi dalam kelima tanggungjawab besar Kementerian Hukum dan HAM, maka dapat dimaknai bahwa diperlukan landasan yang kuat dan kokoh dalam hal

menghasilkan produk hukum, agar mampu merubah mental dan budaya masyarakat Indonesia. Kementerian Hukum dan HAM mempunyai **visi** yaitu :

“Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”

Makna dari visi ini adalah Kepastian hukum dimaksudkan agar hukum di Negara Indonesia tetap terjaga integritasnya, kepastian hukum dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, hukum tidak boleh saling bertentangan, mengikat masyarakatnya dan mengarahkan masyarakat berperilaku positif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



Untuk mencapai visi tersebut, Kementerian Hukum dan HAM menetapkan **misi** sebagai berikut:

- ❖ Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan nasional.
- ❖ Mewujudkan pelayanan hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
- ❖ Mewujudkan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreatifitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional.
- ❖ Mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan.

Guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan tata nilai yang dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh Aparatur Kementerian Hukum dan HAM, yaitu dengan menjunjung nilai

PASTI :

Profesional : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;

Akuntabel : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;

Sinergi : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;

Transparan : Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;

Inovatif : Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Sementara itu tujuan yang ingin dicapai Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah adalah:

Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia pada Kementerian Hukum dan HAM di daerah.



Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target

Berikut informasi sasaran kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU), Target, Program, dan Pagu yang harus dicapai oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah selama Tahun Anggaran 2019 :

Sasaran Strategis	IKU	Target	Program	Pagu 2019 (Rp)
Meningkatnya kompetensi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah lulusan yang mengikuti diklat berbasis kompetensi di Kantor Wilayah	780 orang	Diklat teknis (klasikal dan e-learning)	2.918.356.000
		506 orang	Diklat kepemimpinan (Pelatihan Dasar CPNS)	7.194.553.000
	Tersedianya layanan internal dukungan manajemen satker	1 layanan	-	196.690.000
	Terselenggaranya layanan gaji dan perkantoran	1 layanan	-	1.704.869.000



A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja atas apa yang menjadi sasaran strategis demi tercapainya target kinerja yang telah ditentukan. Adapun rencana kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2019 adalah :

Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Satuan	Target
Meningkatnya kompetensi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah lulusan yang mengikuti diklat berbasis kompetensi di Kantor Wilayah	Pelatihan Teknis (klasikal dan e-learning)	orang	780
		Pelatihan Kepemimpinan (Pelatihan Dasar CPNS)	orang	506
	Tersedianya layanan internal dukungan manajemen satker	-	layanan	1
	Terselenggaranya layanan gaji dan perkantoran	-	layanan	1

B. Anggaran Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah

Anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2019 dalam pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan DIPA Nomor : SP DIPA-013.12.2.409157/2019 tanggal 5 Desember 2018 adalah sebesar Rp 12.014.468.000 dengan rincian sebagai berikut.

**BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM
DAN HAM JAWA TENGAH**

*Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Kementerian Hukum dan HAM*

5249	<i>Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah</i>	12.014.468.000
5249.001	<i>Penyelenggaraan Diklat Aparatur pada Balai Diklat Hukum dan HAM</i>	10.112.909.000
5249.100	<i>Dukungan Manajemen Satker Balai Diklat Hukum dan HAM</i>	196.690.000
5249.994	<i>Layanan Perkantoran</i>	1.704.869.000
	Jumlah	12.014.468.000



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA



A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai target kerja sesuai dengan sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sasaran Strategis :

Meningkatnya Kompetensi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM

PROGRAM 1 :
DIKLAT TEKNIS (KLASIKAL DAN E-LEARNING) DAN
DIKLAT KEPEMIMPINAN (PELATIHAN DASAR CPNS)

Pendidikan dan pelatihan merupakan proses belajar mengajar yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para aparatur sesuai dengan bidang/jabatannya masing-masing. Pendidikan dan pelatihan ini tentunya



sangat penting mengingat sumber daya manusia merupakan penggerak suatu organisasi sehingga dibutuhkan insan yang handal, berkompeten, dan terampil.

>>> Diklat Teknis (Klasikal dan E-Learning)

Diklat teknis terdiri atas pelatihan klasikal dan pelatihan e-learning. **Pelatihan klasikal** dilakukan secara langsung (tatap muka) antara peserta dan pengajar (Widya Iswara) pada satu tempat pelatihan. Kegiatan ini memberi ruang yang cukup banyak bagi peserta dan pengajar untuk berinteraksi dan tanya jawab. Selain itu juga mempermudah peserta untuk menerima materi dan pelatihan secara langsung.

Berbeda dengan pelatihan klasikal, bentuk penyelenggaraan diklat berbasis teknologi informasi berupa website yang diterapkan di bidang pendidikan adalah **E-Learning**. Sistem pembelajaran ini dapat diakses di mana saja dengan menghubungkannya pada jaringan internet. E-Learning telah mempersingkat waktu pelatihan dan membuat biaya pelatihan lebih ekonomis karena hanya membutuhkan koneksi internet.

Persamaan dan perbedaan antara diklat klasikal dan diklat e-learning yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Hukum dan HAM dapat dilihat pada tabel berikut.

NO	INDIKATOR	DIKLAT KLASIKAL	DIKLAT E-LEARNING
1	Sistem pelaksanaan	Langsung (tatap muka)	Online
2	Persyaratan Umum	✓ Usia maksimal 40 tahun; ✓ Sehat jasmani dan rohani; ✓ Memiliki loyalitas dan dedikasi yang baik	✓ Usia maksimal 40 tahun; ✓ Sehat jasmani dan rohani; ✓ Memiliki loyalitas dan dedikasi yang baik ✓ Mampu mengoperasikan perangkat komputer
3	Metode Pembelajaran	ceramah, diskusi, tanya jawab, praktik/simulasi, dan latihan	diskusi, chatting, belajar mandiri, tanya jawab, ujian online/offline
4	Tenaga Pengajar	✓ penceramah dan Widya Iswara dari BPSDM Hukum dan HAM ✓ tim pengajar dari Kantor Wilayah ✓ tim pengajar dari instansi lain yang memiliki keterkaitan dengan	Widya Iswara dari BPSDM Hukum dan HAM



		diklat tersebut (jika diperlukan)	
5	Fasilitas dan Akomodasi	✓ diwajibkan tinggal di tempat diklat ✓ fasilitas pelatihan berupa ruang kelas atau meeting room yang dilengkapi dengan LCD, white board, flip chart, dan fasilitas pendukung lainnya	✓ tidak memerlukan tempat diklat ✓ fasilitas yang diperlukan berupa PC
6	Kualifikasi Kelulusan	✓ Skor 90,1 – 100 : Sangat Memuaskan ✓ Skor 80,1 – 90 : Memuaskan ✓ Skor 70,1 – 80 : Cukup Memuaskan ✓ Skor 60,1 – 70 : Kurang Memuaskan ✓ Skor <60 : Tidak Memuaskan	✓ Penilaian keaktifan, peserta dinyatakan lulus jika keaktifannya ≥ 50 ✓ Penilaian ujian, peserta dinyatakan lulus jika nilai ujiannya ≥ 70
7	Penghargaan	Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)	Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

Sebelum menyelenggarakan diklat tentunya Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak-pihak terkait seperti:

- BPSDM Hukum dan HAM terkait rencana pelaksanaan dan permintaan tenaga Penceramah dan Widya Iswara;
- Kantor Wilayah terkait permintaan nama-nama calon peserta dan kesediaan tenaga pengajar;
- Lembaga pelatihan atau hotel sebagai tempat penyelenggaraan dan penyedia fasilitas;
- Pihak lain yang memiliki keterkaitan guna mendukung dan memberi materi pembelajaran bagi peserta.

Apabila persiapan tersebut telah dilakukan maka Balai Diklat akan melakukan pemanggilan calon peserta untuk mengikuti kegiatan tersebut.



Pada Tahun Anggaran 2019, Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah telah menyelenggarakan 6 (enam) diklat klasikal dan 7 (tujuh) diklat e-learning dengan rincian sebagai berikut :

No	Waktu	Nama Kegiatan	Output	Keterangan	Kendala
1	17-23 Maret 2019	Pelatihan Teknis Pengamanan bagi Petugas Pintu Utama (P2U) pada Lapas dan Rutan Angkatan I-II TA 2019	80 peserta	Diadakan di Bapelkes Semarang	-
	24-30 Maret 2019	Pelatihan Teknis Pengamanan bagi Petugas Pintu Utama (P2U) pada Lapas dan Rutan Angkatan III TA 2019	40 peserta	Diadakan di Hotel New Puri Garden Semarang	-
2	21-27 April 2019	Pelatihan Teknis Pengawasan Keimigrasian Angkatan I-II TA 2019	80 peserta	Diadakan di Hotel @HOM Semarang	-
3	19-22 Juni 2019	Pelatihan Teknis untuk Pelaksana pada Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat Angkatan I-II TA 2019	60 peserta	Diadakan di Hotel Kesambi Hijau Semarang	-
4	23-29 Juni 2019	Pelatihan Teknis bagi Kepala Regu Pengamanan pada Lapas dan Rutan Angkatan I-II TA 2019	80 peserta	Diadakan di Hotel @HOM Semarang	-
5	21-27 Juli 2019	Pelatihan Bendahara Pengeluaran Angkatan I TA 2019	30 peserta	Diadakan Hotel @HOM Premiere Timoho Yogyakarta	-
	18-24 Agustus 2019	Pelatihan Bendahara Pengeluaran Angkatan II TA 2019	35 peserta	Diadakan Hotel @HOM Premiere Timoho Yogyakarta	-
6	3-9 November 2019	Pelatihan Pelayanan Publik Angkatan I-II TA 2019	60 peserta	Diadakan di Pusdiklat PMI Jawa Tengah	-



7	1-7 Juli 2019	Pelatihan E-Learning Administrasi Perkantoran Tingkat Dasar (APTD)	40 peserta	-	-
8	1-9 Juli 2019	Pelatihan E-Learning Muatan Teknis Substansi Lembaga (MTSL)	40 peserta	-	-
9	5-9 Agustus 2019	Pelatihan E-Learning Pelayanan Publik Tingkat Dasar (PPTD)	40 peserta	-	-
10	5-12 Agustus 2019	Pelatihan E-Learning Reformasi Birokrasi (RB)	80 peserta	-	-
11	14-19 Oktober 2019	Pelatihan E-Learning Administrasi Perkantoran Tingkat Lanjutan (APTL)	40 peserta	-	-
12	14-19 Oktober 2019	Pelatihan E-Learning Pelayanan Publik Tingkat Lanjutan (PPTL)	40 peserta	-	-
13	14-19 Oktober 2019	Pelatihan E-Learning Pengelolaan BMN	40 peserta	-	-

1. Pelatihan Teknis Pengamanan bagi Petugas Pintu Utama (P2U) Angkatan I-III pada Lapas dan Rutan TA 2019

Pelatihan ini merupakan program pelatihan di bidang Pemasasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Penjaga Pintu Utama (P2U) dalam pengamanan Lapas dan Rutan sesuai dengan Permenkumham No. 33 Tahun 2015 tentang Peraturan Pengamanan Pada Lembaga Pemasasyarakatan dan Rumah Tahanan



Praktik Kerja Lapangan di Lapas Kelas I Semarang



Negara yang mana dalam rangka mewujudkan sistem keamanan di Lapas dan Rutan yang teratur, aman dan tentram perlu dilakukan secara terencana, terarah dan sistematis untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.



Pengenalan dasar alat-alat pendukung pengamanan dan simulasi

Hasil kegiatan Pelatihan Teknis Pengamanan bagi Petugas Pintu Utama (P2U) pada Lapas dan Rutan Angkatan I-III TA 2019 :

N O	NAMA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	TARGET	LULUS	TIDAK LULUS	KETERANGAN	KENDALA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelatihan Teknis Pengamanan Bagi Petugas Pintu Utama (P2U) Pada Lapas dan Rutan Tahun Anggaran 2019	Angkatan I-II 17-23 Maret 2019	80 peserta	80 peserta	-	Proses Penerbitan STTPL	-
		Angkatan III 24-30 Maret 2019	40 peserta	40 peserta	-	Proses Penerbitan STTPL	-

2. Pelatihan Teknis Pengawasan Keimigrasian Angkatan I dan II TA 2019

Pelatihan ini dimaksud untuk pengembangan sumber daya bagi pegawai Imigrasi di bagian pengawasan dan penindakan untuk mampu mendukung terhadap kebijakan pemerintah juga dalam rangka menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum, dan kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul dari perlintasan orang antar, keberadaan, dan kegiatan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.



Pemberian Materi pada Pelatihan Teknis Pengawasan Keimigrasian

Hasil kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan Keimigrasian Angkatan I-II TA 2019:

N O	NAMA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	TARGET	LULUS	TIDAK LULUS	KETERANGAN	KENDALA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelatihan Teknis Pengawasan Keimigrasian Angkatan I-II TA 2019	21 April 2019 s.d. 27 April 2019	80 peserta	80 peserta	-	Proses Penerbitan STTPL	-

3. Pelatihan Teknis untuk Pelaksana pada Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat Angkatan I dan II TA 2019



Pelaksanaan Pelatihan untuk Pelaksana pada Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat

Pelatihan ini merupakan program pelatihan yang ditujukan bagi Pelaksana Pelayanan Komunikasi Masyarakat yang memberikan pemahaman secara teknis tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat dalam pelaksanaan tugas sehingga peserta mampu memberikan masukan kepada masyarakat yang



merasa hak asasinya terlanggar setelah menganalisa dugaan pelanggaran HAM dalam proses hukum dengan baik.



Pelaksanaan Pelatihan untuk Pelaksana pada Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat

Hasil kegiatan Pelatihan untuk Pelaksana pada Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat Angkatan I dan II TA 2019 :

N O	NAMA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	TARGET	LULUS	TIDAK LULUS	KETERANGAN	KENDALA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelatihan Teknis untuk Pelaksana pada Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) Angkatan I-II TA 2019	19-22 Juni 2019	60 peserta	58 peserta	-	Proses Penerbitan STTPL	Jumlah peserta lulus sebanyak 58 orang dikarenakan 2 orang peserta tidak hadir dalam pelaksanaan diklat dan hingga berakhirnya diklat tidak ada peserta pengganti yang diajukan Kanwil atau UPT yang bersangkutan.



4. Pelatihan Teknis bagi Kepala Regu Pengamanan pada Lapas dan Rutan Angkatan I dan II TA 2019

Sama seperti pelatihan teknis bagi Petugas Pintu Utama (P2U), pelatihan ini juga merupakan program di bidang Pemasarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Kepala Regu dalam pengamanan Lapas dan Rutan.



Simulasi Teknik dan Strategi Penanganan Huru Hara

Hasil kegiatan Pelatihan Teknis Pengamanan bagi Kepala Regu Pengamanan pada Lapas dan Rutan Angkatan I dan II TA 2019 :

N O	NAMA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	TARGET	LULUS	TIDAK LULUS	KETERANGAN	KENDALA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelatihan Teknis Pengamanan bagi Kepala Regu pada Lapas dan Rutan TA Angkatan I-II TA 2019	23-29 Juni 2019	80 peserta	80 peserta	-	Proses Penerbitan STTPL	-

5. Pelatihan Bendahara Pengeluaran Angkatan I dan II TA 2019

Pelaksanaan pelatihan ini bekerja sama dengan Balai Diklat Keuangan Yogyakarta yang peruntukannya dikhususkan bagi bendahara pengeluaran atau pegawai yang diproyeksikan menjadi bendahara satuan kerja. Pelatihan ini merupakan kesempatan bagi para bendahara maupun calon bendahara untuk mendapatkan Sertifikat Bendahara karena berdasarkan peraturan terbaru



seorang bendahara selaku pengelola keuangan negara harus diakui oleh negara dan hal ini mewajibkan mereka untuk memiliki sertifikat bendahara pada tahun 2020.

Setelah menerima materi dari para pengajar atau Widya Iswara, peserta akan mengikuti ujian komprehensif. Peserta yang gagal mengikuti ujian komprehensif akan mendapatkan sertifikat lah mengikuti diklat, sementara peserta yang lulus ujian komprehensif akan lanjut mengikuti ujian sertifikasi dan peserta yang lulus ujian sertifikasi akan menerima Sertifikat Bendahara.



Kuis persiapan Ujian Komprehensif



Simulasi aplikasi SAS untuk Bendahara Pengeluaran

Hasil kegiatan Pelatihan Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada tabel berikut.

N O	NAMA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSA NAAN	TARGET	LULUS	TIDAK LULUS	KETERANGAN	KENDALA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelatihan Bendahara Pengeluaran Angkatan I TA 2019	21-27 Juli 2019	30 peserta	23 peserta	7 peserta	1. Sebanyak 23 peserta lulus mengikuti Ujian Komprehensif dan berhak untuk mengikuti Ujian Sertifikasi. 2. Dari 23 peserta Ujian Sertifikasi terdapat 4 peserta yang telah memiliki Sertifikat Bendahara sehingga jumlah peserta yang mengikuti Ujian Sertifikasi adalah sebanyak 19 orang. 3. Dari 19 peserta yang mengikuti Ujian Sertifikasi tersebut seluruhnya dinyatakan lulus Ujian Sertifikasi Bendahara. 4. Proses penerbitan sertifikat	-



2	Pelatihan Bendahara Pengeluaran Angkatan II TA 2019	18-24 Agustus 2019	35 peserta	24 peserta	11	<ol style="list-style-type: none">1. Sebanyak 24 peserta lulus mengikuti Ujian Komprehensif dan berhak untuk mengikuti Ujian Sertifikasi.2. Dari 24 peserta Ujian Sertifikasi terdapat 7 peserta yang telah memiliki Sertifikat Bendahara sehingga jumlah peserta yang mengikuti Ujian Sertifikasi adalah sebanyak 17 orang.3. Dari 17 peserta yang mengikuti Ujian Sertifikasi tersebut seluruhnya dinyatakan lulus Ujian Sertifikasi Bendahara.4. Proses penerbitan sertifikat.	-
---	--	--------------------	------------	------------	----	--	---

6. Pelatihan Pelayanan Publik Angkatan I-II TA 2019

Pelatihan ini merupakan pelatihan tambahan yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah. Pelatihan ini dimaksudkan untuk mengembangkan kompetensi dan sistem pelayanan publik. Pada kesempatan ini juga dilakukan kunjungan studi tiru dan benchmarking ke salah satu instansi dengan layanan publik terbaik di kota Semarang, yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).



Diskusi interaktif peserta pelatihan dengan Kabadiklat



Benchmarking Pelayanan Publik ke DPMPSTP Kota Semarang



Hasil kegiatan Pelatihan Pelayanan Publik dapat dilihat pada tabel berikut.

N O	NAMA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	TARGET	LULUS	TIDAK LULUS	KETERANGAN	KENDALA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelatihan Pelayanan Publik Angkatan I-II TA 2019	3-9 November 2019	60 peserta	60 peserta	-	Proses Penerbitan STTPL	-

7. Pelatihan E-Learning Administrasi Perkantoran Tingkat Dasar (APTD)

Hasil kegiatan Diklat E-Learning APTD dapat dilihat pada tabel berikut :

N O	NAMA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	TARGET	LULUS	TIDAK LULUS	KETERANGAN	KENDALA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Diklat E-Learning Muatan Teknis Substansi Lembaga (MTSL)	1-7 Juli 2019	40 peserta	39 peserta	1 peserta	Peserta tidak lulus karena : - kurangnya keaktifan peserta dalam forum diskusi dengan pengajar - tidak mengikuti ujian	-

8. Pelatihan E-Learning Muatan Teknis Substansi Lembaga (MTSL)

Hasil kegiatan Diklat E-Learning MTSL dapat dilihat pada tabel berikut :

N O	NAMA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	TARGET	LULUS	TIDAK LULUS	KETERANGAN	KENDALA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Diklat E-Learning Muatan Teknis Substansi Lembaga (MTSL)	1-9 Juli 2019	40 peserta	35 peserta	5 peserta	Peserta tidak lulus karena : - kurangnya keaktifan peserta dalam forum diskusi dengan pengajar - tidak mengikuti ujian	-



9. Pelatihan E-Learning Pelayanan Publik Tingkat Dasar (PPTD)

Hasil kegiatan Diklat E-Learning PPTD dapat dilihat pada tabel berikut :

N O	NAMA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	TARGET	LULUS	TIDAK LULUS	KETERANGAN	KENDALA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Diklat E-Learning Pelayanan Publik Tingkat Dasar (PPTD)	5-9 Agustus 2019	40 peserta	25 peserta	15 peserta	Peserta tidak lulus karena : - kurangnya keaktifan peserta dalam forum diskusi dengan pengajar - tidak mengikuti ujian	-

10. Pelatihan E-Learning Reformasi Birokrasi (RB)

Hasil kegiatan Diklat E-Learning RB dapat dilihat pada tabel berikut :

N O	NAMA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	TARGET	LULUS	TIDAK LULUS	KETERANGAN	KENDALA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Diklat E-Learning Reformasi Birokrasi (RB)	5-12 Agustus 2019	80 peserta	Akt I : 31 Akt II : 25	Akt I : 9 Akt II : 15	Peserta tidak lulus karena : - kurangnya keaktifan peserta dalam forum diskusi dengan pengajar - tidak mengikuti ujian	-

11. Pelatihan E-Learning Administrasi Perkantoran Tingkat Lanjutan (APTL)

Hasil kegiatan Diklat E-Learning APTL dapat dilihat pada tabel berikut :

N O	NAMA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	TARGET	LULUS	TIDAK LULUS	KETERANGAN	KENDALA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Diklat E-Learning Administrasi Perkantoran Tingkat Lanjutan (APTL)	14-19 Oktober 2019	40 peserta	35 peserta	5 peserta	Peserta tidak lulus karena : - kurangnya keaktifan peserta dalam forum diskusi dengan pengajar - tidak mengikuti ujian	-



12. Pelatihan E-Learning Pelayanan Publik Tingkat Lanjutan (PPTL)

Hasil kegiatan Diklat E-Learning PPTL dapat dilihat pada tabel berikut :

N O	NAMA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	TARGET	LULUS	TIDAK LULUS	KETERANGAN	KENDALA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Diklat E-Learning Pelayanan Publik Tingkat Lanjutan (PPTL)	14-19 Oktober 2019	40 peserta	31 peserta	9 peserta	Peserta tidak lulus karena : - kurangnya keaktifan peserta dalam forum diskusi dengan pengajar - tidak mengikuti ujian	-

13. Pelatihan E-Learning Pengelolaan BMN

Hasil kegiatan Diklat E-Learning Pengelolaan BMN dapat dilihat pada tabel berikut :

N O	NAMA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	TARGET	LULUS	TIDAK LULUS	KETERANGAN	KENDALA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Diklat E-Learning Pengelolaan BMN	14-19 Oktober 2019	40 peserta	26 peserta	14 peserta	Peserta tidak lulus karena : - kurangnya keaktifan peserta dalam forum diskusi dengan pengajar - tidak mengikuti ujian	-



>>> Diklat Kepemimpinan (Pelatihan Dasar CPNS)

Menurut Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar CPNS disebutkan bahwa masa prajabatan adalah masa percobaan selama 1 (satu) tahun yang wajib dijalani oleh CPNS melalui proses pendidikan dan pelatihan dan pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa CPNS wajib menjalani masa prajabatan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan sebagai CPNS.

Pelatihan Dasar tersebut dilakukan dalam bentuk klasikal dan nonklasikal. Pelatihan klasikal dilakukan secara tatap muka di dalam kelas dan dilakukan pendampingan, baik berupa penguatan jasmani, rohani maupun spiritual. Sementara itu pelatihan nonklasikal dilakukan melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja atau magang.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 04 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM bertugas untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan HAM, termasuk juga untuk menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS. Pada tahun 2019, jumlah CPNS yang tersebar pada wilayah kerja Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah adalah sebanyak 506 peserta. Pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS diselenggarakan di 4 (empat) wilayah antara lain Semarang, Malang dan Mojokerto, Denpasar, serta Palangkaraya. Pembagian wilayah tersebut dilakukan dengan berbagai pertimbangan seperti :

- Banyaknya jumlah CPNS sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan di 1 (satu) tempat;
- Untuk meminimalisir biaya transportasi khususnya biaya pesawat;
- Terbatasnya jumlah lembaga pelatihan dan pengajar atau Widya Iswara.

Pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS dibagi menjadi 2 tahap, yaitu :

1. **On Campus I**, pada tahap ini peserta akan menjalani masa Orientasi yaitu proses pembelajaran di dalam kelas serta ujian seminar Rancangan Aktualisasi yang dilaksanakan selama 18 hari sejak dimulainya Pelatihan Dasar. Setelah menjalani masa Orientasi, peserta akan kembali bertugas ke satuan kerjanya



masing-masing untuk menjalani masa Aktualisasi dan Habitiasi yaitu menjalankan rancangan aktualisasi dan menjadikannya sebagai habit atau kebiasaan. Masa Aktualisasi dan Habitiasi ini berlangsung selama 30 hari.

2. **On Campus II**, pada tahap ini peserta kembali ke tempat pelatihan untuk diuji hasil Aktualisasi yang telah dilakukan selama di satuan kerja. Masa On Campus II tersebut berlangsung selama 4 hari.

Dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS tersebut Balai Diklat Jawa Tengah bekerja sama dengan lembaga pelatihan terakreditasi pada keempat wilayah tersebut.

1. Semarang

Pelatihan Dasar ini bekerja sama dengan Balai Diklat Keagamaan Semarang dan diselenggarakan di Pusdiklat PMI Jawa Tengah. Untuk wilayah Semarang diperuntukan bagi CPNS di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta yang berjumlah total 100 peserta dengan rincian :

- Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah : 82 orang
- Kantor Wilayah Kemenkumham D.I.Yogyakarta : 18 orang

Adapun waktu penyelenggaraan Pelatihan Dasar tersebut adalah sebagai berikut :

On Campus I : 1 s.d. 19 September 2019

On Campus II : 21 s.d. 24 Oktober 2019





2. Malang dan Mojokerto

Pelatihan Dasar ini bekerja sama dengan BPSDM Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan di BPSDM Provinsi Jawa Timur dan Kampus Warung Desa Mojokerto. Untuk wilayah Malang dan Mojokerto diperuntukan bagi CPNS di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat yang berjumlah total 174 peserta dengan rincian :

- Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur : 97 orang
- Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur : 41 orang
- Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat : 36 orang

Namun dari 174 peserta tersebut terdapat 2 (dua) peserta yang berasal dari Kalimantan Timur yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan jauh dan menjalani Pelatihan Dasar di wilayah Malang/Mojokerto dikarenakan sedang dalam kondisi hamil, maka kedua peserta tersebut mengikuti Pelatihan Dasar CPNS di Kalimantan Timur yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun waktu penyelenggaraan Pelatihan Dasar tersebut adalah :

Di Malang (120 peserta)

On Campus I : 17 September s.d. 6 Oktober 2019

On Campus II : 5 s.d. 8 November 2019

Di Mojokerto (51 peserta)

On Campus I : 10 s.d. 28 September 2019

On Campus II : 28 s.d. 31 Oktober 2019



3. Denpasar

Pelatihan Dasar ini bekerja sama dengan Balai Diklat Keagamaan Denpasar dan diselenggarakan di Hotel Puri Nusa Indah Denpasar. Untuk wilayah Denpasar diperuntukan bagi CPNS di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang berjumlah total 139 peserta yang dibagi menjadi 2 (dua) gelombang dengan rincian :

- Kantor Wilayah Kemenkumham Bali : 40 orang
- Kantor Wilayah Kemenkumham NTB : 44 orang
- Kantor Wilayah Kemenkumham NTT : 55 orang

Adapun waktu penyelenggaraan Pelatihan Dasar tersebut adalah sebagai berikut :



Gelombang I (71 peserta)

On Campus I : 3 s.d. 24 September 2019

On Campus II : 30 Oktober s.d. 2 November 2019

Gelombang II (68 peserta)

On Campus I : 29 September s.d. 19 Oktober 2019

On Campus II : 19 s.d. 22 November 2019



4. Palangkaraya

Pelatihan Dasar ini bekerja sama dengan BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah dan diselenggarakan di LPMP Provinsi Kalimantan Tengah dan Asrama Haji Al-Mabrur Palangkaraya. Untuk wilayah Palangkaraya diperuntukan bagi CPNS di



jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan yang berjumlah total 96 peserta dengan rincian :

- Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah : 39 orang
- Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan : 57 orang

Adapun waktu penyelenggaraan Pelatihan Dasar tersebut adalah sebagai berikut :

On Campus I : 8 s.d. 28 September 2019

On Campus II : 29 Oktober s.d. 1 November 2019





Berdasarkan hasil kegiatan seluruh pelatihan baik teknis maupun kepemimpinan di atas maka dirangkum hasil capaian dari sasaran strategis Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM pada Tahun Anggaran 2019 seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini.

Sasaran	Program	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya kompetensi Aparatur Kementrian Hukum dan HAM	Diklat Teknis (Klasikal dan E-Learning)	Pelatihan Teknis Pengamanan bagi Petugas Pintu Utama (P2U) Angkatan I-III TA 2019	120 orang	120 orang	100
		Pelatihan Teknis Pengawasan Keimigrasian Angkatan I-II TA 2019	80 orang	80 orang	100
		Pelatihan Teknis untuk Pelaksana pada Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat Angkatan I-II TA 2019	60 orang	58 orang	96,67
		Pelatihan Teknis bagi Kepala Regu Pengamanan pada Lapas dan Rutan Angkatan I-II TA 2019	80 orang	80 orang	100
		Pelatihan Bendahara Pengeluaran Angkatan I-II TA 2019	60 orang	65 orang	108,33
		Pelatihan Pelayanan Publik Angkatan I-II TA 2019	60 orang	60 orang	100
		Pelatihan E-Learning Muatan Teknis Substansi Lembaga (MTSL) TA 2019	40 orang	40 orang	100
		Pelatihan E-Learning Adminstrasi Perkantoran Tingkat Dasar (APTD) TA 2019	40 orang	40 orang	100
		Pelatihan E-Learning Pelayanan Publik Tingkat Dasar (PPTD) TA 2019	40 orang	40 orang	100



		Pelatihan E-Learning Reformasi Birokrasi (RB) TA 2019	80 orang	80 orang	100
		Pelatihan E-Learning Administrasi Perkantoran Tingkat Lanjutan (APTL) TA 2019	40 orang	40 orang	100
		Pelatihan E-Learning Pelayanan Publik Tingkat Lanjutan (PPTL) TA 2019	40 orang	40 orang	100
		Pelatihan E-Learning Pengelolaan BMN TA 2019	40 orang	40 orang	100
	Diklat Kepemimpinan	Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2018 TA 2019	506 orang	506 orang	100
Jumlah			1.286 orang	1.289 orang	100,23

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2019, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah telah menetapkan target untuk menyelenggarakan pelatihan teknis bagi 1.286 orang Aparatur Kementerian Hukum dan HAM. Namun pada realisasinya jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan adalah sebanyak 1.289 orang. Hal ini dikarenakan adanya penambahan peserta sebanyak 5 (lima) orang pada Pelatihan Bendahara Pengeluaran Angkatan II. Namun pada Pelatihan untuk Pelaksana pada Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) terdapat 2 (dua) orang peserta yang tidak hadir saat pelaksanaan pelatihan dan hingga berakhirnya diklat tidak ada peserta pengganti yang diajukan oleh Kantor Wilayah atau UPT yang bersangkutan sehingga menyebabkan capaian diklat tersebut tidak maksimal. Meski demikian secara keseluruhan capaian kinerja sasaran strategis Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah telah melebihi target dengan nilai persentase sebesar 100,23%.



Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu proses sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program Pendidikan dan dengan kriteria tertentu untuk keperluan pembuatan keputusan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program Pendidikan dan Pelatihan mencapai sasaran yang diharapkan dengan penekanan pada aspek hasil (*output*). Evaluasi dalam pelatihan ini dilaksanakan dengan mengadakan Pre Test dan Post Test menggunakan aplikasi CBT (*Computer Based Test*) dan aplikasi SIEVA yang terdiri atas:

a. Tes Awal (*pre test*) dan Tes Akhir (*post test*)

Tes awal diberikan kepada peserta pada awal Diklat untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai nilai-nilai dan implementasi hak asasi manusia. Tes akhir diberikan kepada peserta pada akhir Diklat untuk mengetahui perkembangan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai nilai-nilai dan implementasi hak asasi manusia setelah menerima materi. Soal-soal pada tes awal dan tes akhir bersumber dari berbagai bahan ajar termasuk modul Diklat.

Setelah kegiatan pelatihan selesai dilaksanakan maka diperoleh hasil evaluasi dari masing-masing kegiatan pelatihan antara lain :

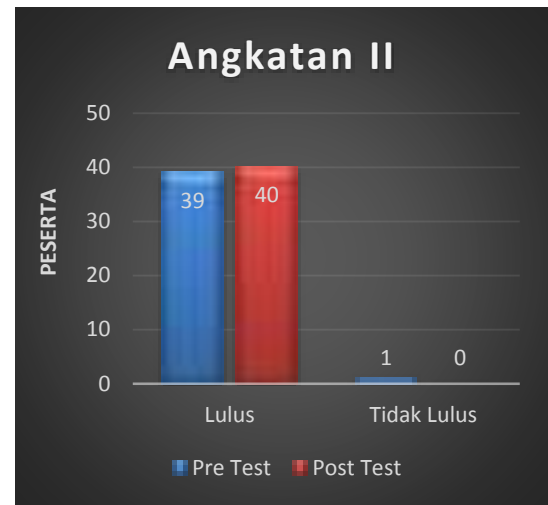
1. Pelatihan Teknis Pengamanan bagi Petugas Pintu Utama (P2U) pada Lapas dan Rutan Angkatan I-III TA 2019



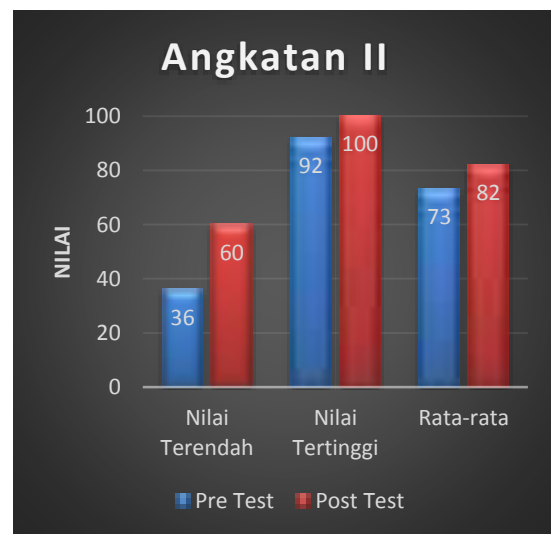
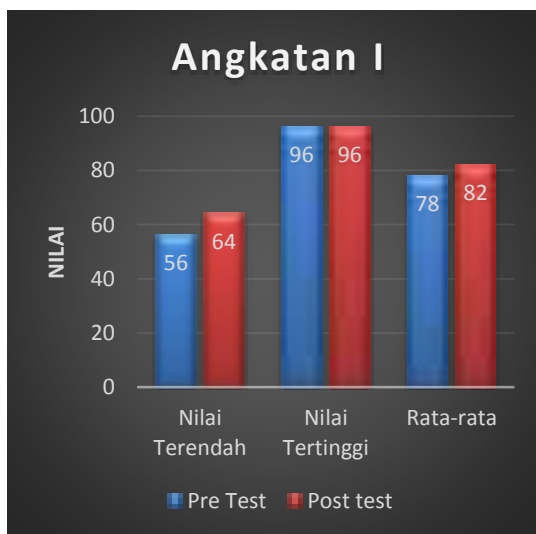
Grafik 3 : Hasil Pre Test dan Post Test Pelatihan Bagi P2U Angkatan I-III



2. Pelatihan Teknis Pengawasan Keimigrasian Angkatan I-II TA 2019

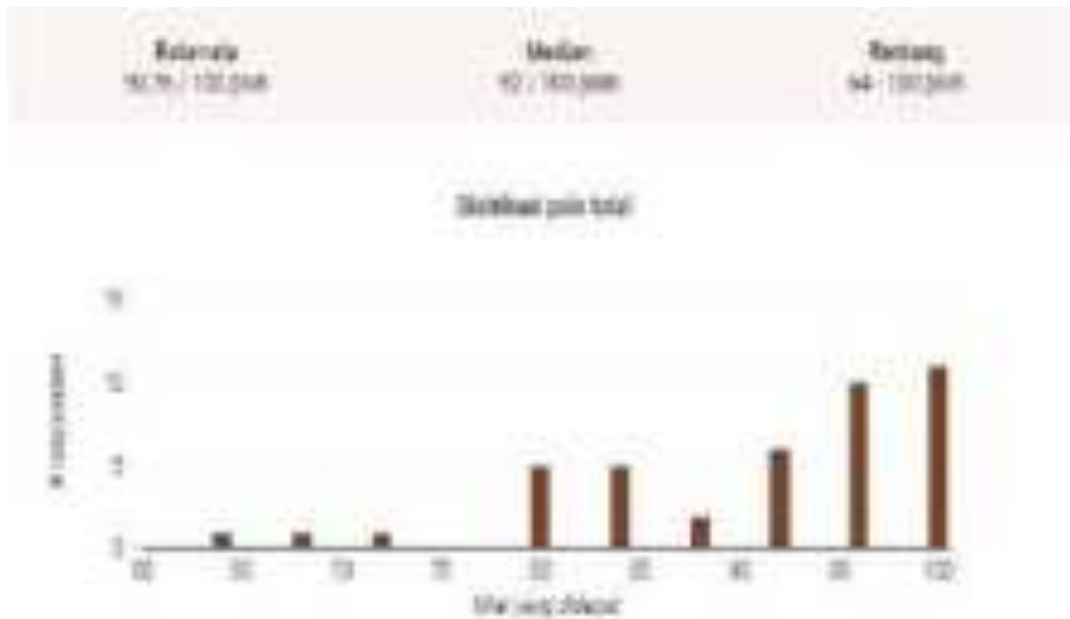


Grafik 4 : Hasil Pre test dan Post Test Pelatihan Pengawasan Keimigrasian berdasarkan Tingkat Kelulusan

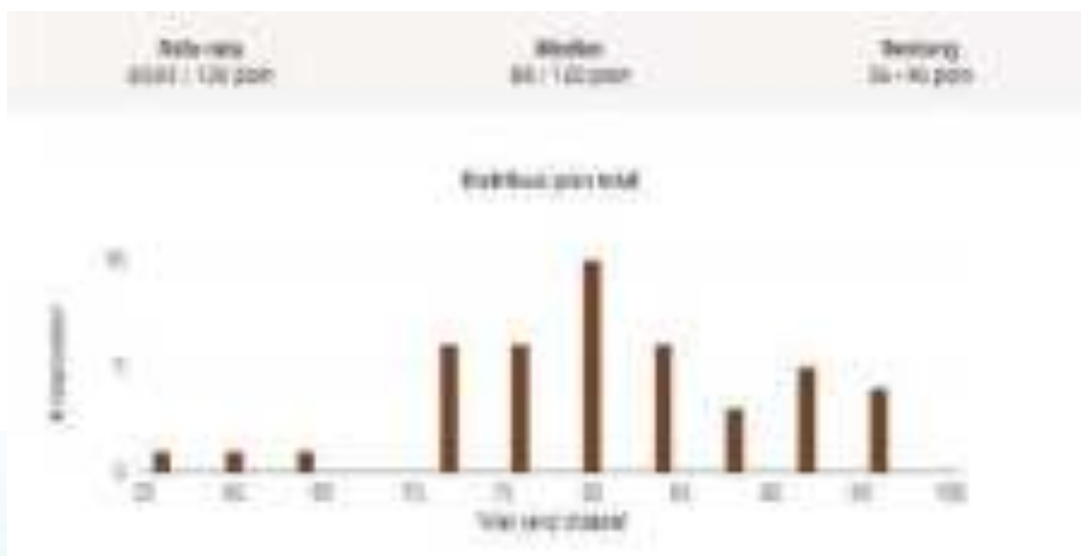




3. Pelatihan untuk Pelaksana pada Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat Angkatan I-II TA 2019



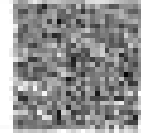
Hasil Pre Test Pelatihan Yankomas



Hasil Post Test Pelatihan Yankomas



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Pusat Pelatihan Nasional
GPT (Compendium Base Year)



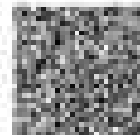
Hasil Pengujian Karupam

No	Uraian Soal	Benar	Salah	Nilai	Nilai Minimal	Nilai Maksimal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Tabel Hasil Pre Test Pelatihan Karupam Angkatan II TA 2019



BPSDM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
Pusat Perkuliahan Kompetensi
CBT (Computer Based Test)

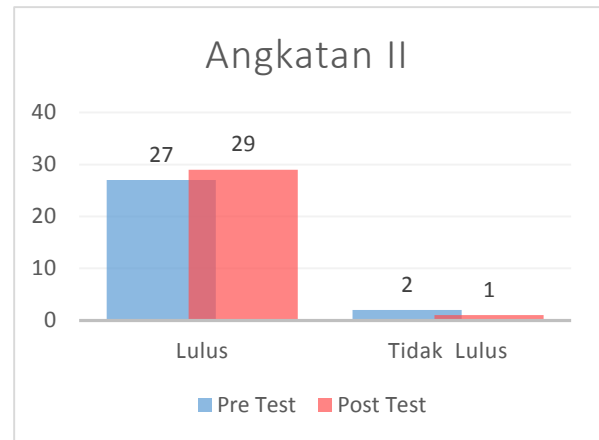
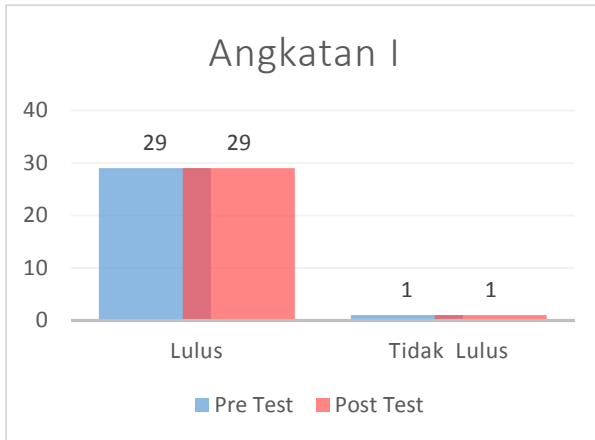


Ringkasan Hasil Test				
NO	NO URUT	NIK	NAMA	HASIL
1	1			
2	2			
3	3			
4	4			
5	5			
6	6			
7	7			
8	8			
9	9			
10	10			
11	11			
12	12			
13	13			
14	14			
15	15			
16	16			
17	17			
18	18			
19	19			
20	20			
21	21			
22	22			
23	23			
24	24			
25	25			
26	26			
27	27			
28	28			
29	29			
30	30			
31	31			
32	32			
33	33			
34	34			
35	35			
36	36			
37	37			
38	38			
39	39			
40	40			
41	41			
42	42			
43	43			
44	44			
45	45			
46	46			
47	47			
48	48			
49	49			
50	50			
51	51			
52	52			
53	53			
54	54			
55	55			
56	56			
57	57			
58	58			
59	59			
60	60			
61	61			
62	62			
63	63			
64	64			
65	65			
66	66			
67	67			
68	68			
69	69			
70	70			
71	71			
72	72			
73	73			
74	74			
75	75			
76	76			
77	77			
78	78			
79	79			
80	80			
81	81			
82	82			
83	83			
84	84			
85	85			
86	86			
87	87			
88	88			
89	89			
90	90			
91	91			
92	92			
93	93			
94	94			
95	95			
96	96			
97	97			
98	98			
99	99			
100	100			
101	101			
102	102			
103	103			
104	104			
105	105			
106	106			
107	107			
108	108			
109	109			
110	110			
111	111			
112	112			
113	113			
114	114			
115	115			
116	116			
117	117			
118	118			
119	119			
120	120			
121	121			
122	122			
123	123			
124	124			
125	125			
126	126			
127	127			
128	128			
129	129			
130	130			
131	131			
132	132			
133	133			
134	134			
135	135			
136	136			
137	137			
138	138			
139	139			
140	140			
141	141			
142	142			
143	143			
144	144			
145	145			
146	146			
147	147			
148	148			
149	149			
150	150			
151	151			
152	152			
153	153			
154	154			
155	155			
156	156			
157	157			
158	158			
159	159			
160	160			
161	161			
162	162			
163	163			
164	164			
165	165			
166	166			
167	167			
168	168			
169	169			
170	170			
171	171			
172	172			
173	173			
174	174			
175	175			
176	176			
177	177			
178	178			
179	179			
180	180			
181	181			
182	182			
183	183			
184	184			
185	185			
186	186			
187	187			
188	188			
189	189			
190	190			
191	191			
192	192			
193	193			
194	194			
195	195			
196	196			
197	197			
198	198			
199	199			
200	200			
201	201			
202	202			
203	203			
204	204			
205	205			
206	206			
207	207			
208	208			
209	209			
210	210			
211	211			
212	212			
213	213			
214	214			
215	215			
216	216			
217	217			
218	218			
219	219			
220	220			
221	221			
222	222			
223	223			
224	224			
225	225			
226	226			
227	227			
228	228			
229	229			
230	230			
231	231			
232	232			
233	233			
234	234			
235	235			
236	236			
237	237			
238	238			
239	239			
240	240			
241	241			
242	242			
243	243			
244	244			
245	245			
246	246			
247	247			
248	248			
249	249			
250	250			
251	251			
252	252			
253	253			
254	254			
255	255			
256	256			
257	257			
258	258			
259	259			
260	260			
261	261			
262	262			
263	263			
264	264			
265	265			
266	266			
267	267			
268	268			
269	269			
270	270			
271	271			
272	272			
273	273			
274	274			
275	275			
276	276			
277	277			
278	278			
279	279			
280	280			
281	281			
282	282			
283	283			
284	284			
285	285			
286	286			
287	287			
288	288			
289	289			
290	290			
291	291			
292	292			
293	293			
294	294			
295	295			
296	296			
297	297			
298	298			
299	299			
300	300			
301	301			
302	302			
303	303			
304	304			
305	305			
306	306			
307	307			
308	308			
309	309			
310	310			
311	311			
312	312			
313	313			
314	314			
315	315			
316	316			
317	317			
318	318			
319	319			
320	320			
321	321			
322	322			
323	323			
324	324			
325	325			
326	326			
327	327			
328	328			
329	329			
330	330			
331	331			
332	332			
333	333			
334	334			
335	335			
336	336			
337	337			
338	338			
339	339			
340	340			
341	341			
342	342			
343	343			
344	344			
345	345			
346	346			
347	347			
348	348			
349	349			
350	350			
351	351			
352	352			
353	353			
354	354			
355	355			
356	356			
357	357			
358	358			
359	359			
360	360			
361	361			
362	362			
363	363			
364	364			
365	365			
366	366			
367	367			
368	368			
369	369			
370	370			

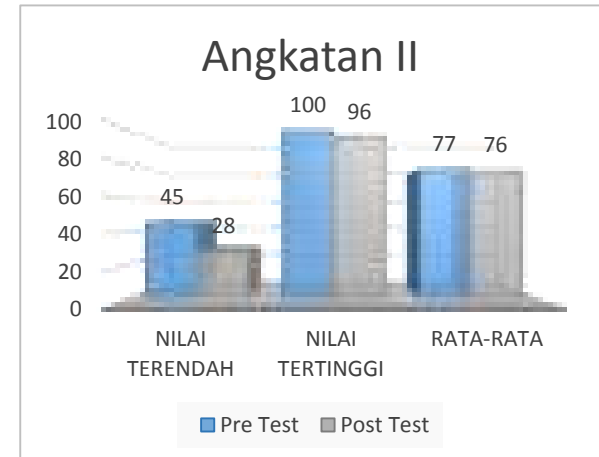
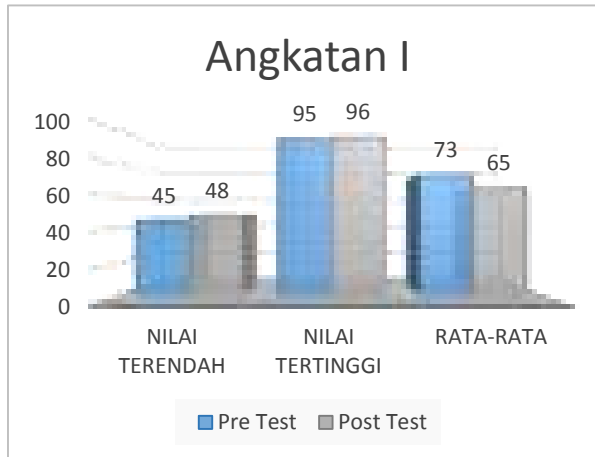


5. Pelatihan Pelayanan Publik Angkatan I dan II TA 2019

- Berdasarkan kelulusan :

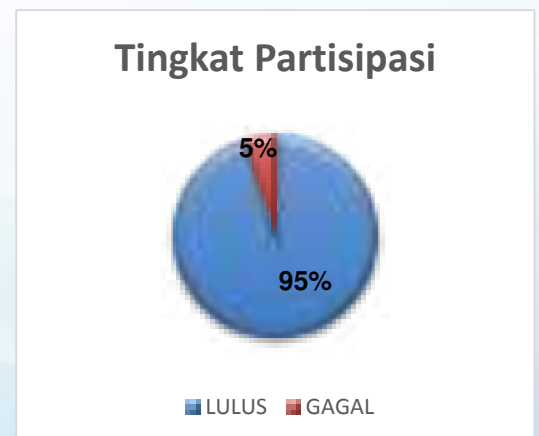
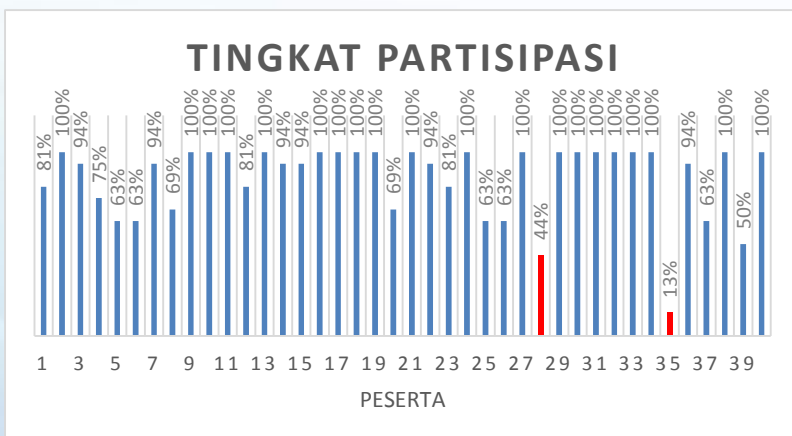


- Berdasarkan nilai yang diraih :



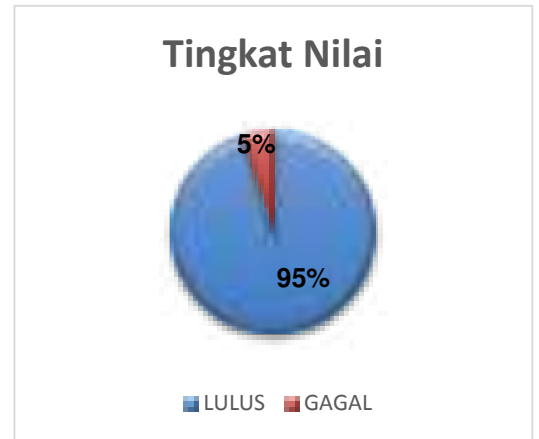
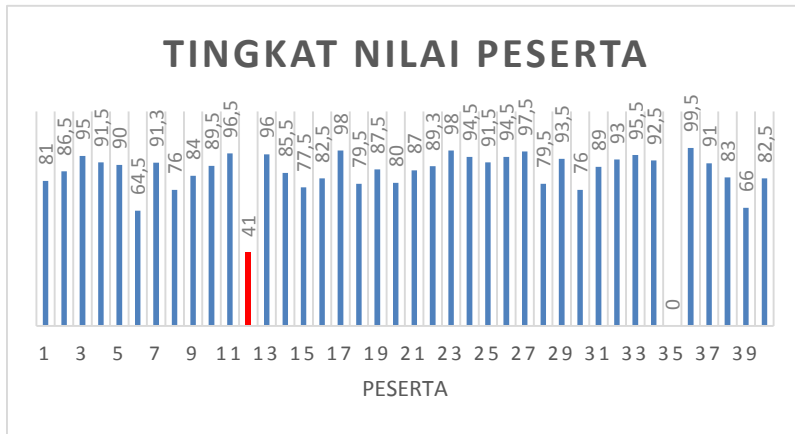
6. Pelatihan E-Learning Administrasi Perkantoran Tingkat Dasar (APTĐ)

- Tingkat partisipasi :

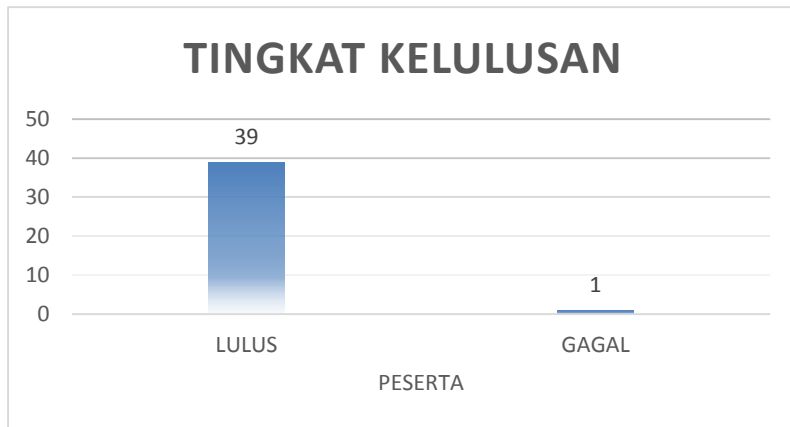




- *Tingkat nilai ujian :*

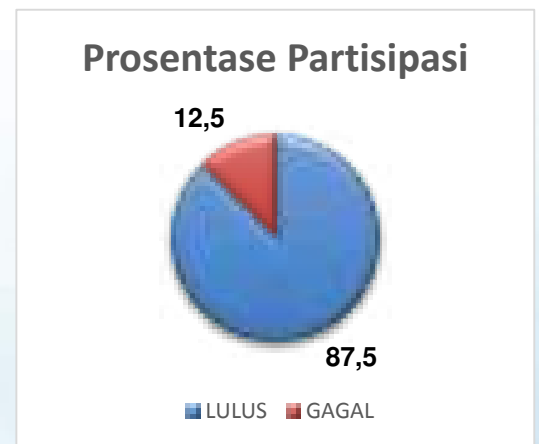
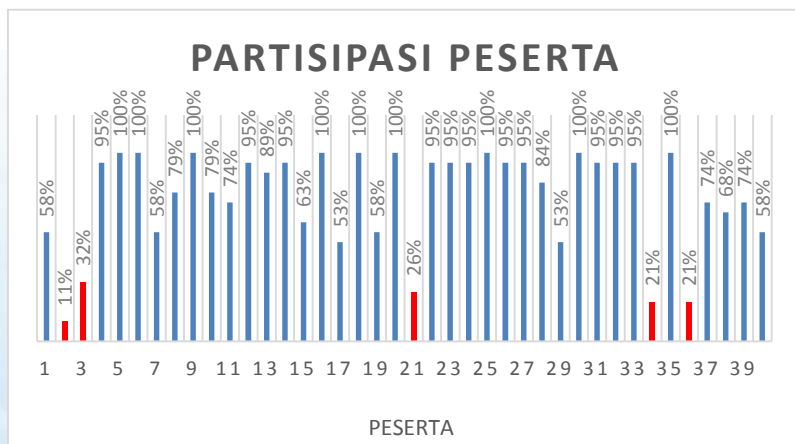


- *Tingkat kelulusan :*



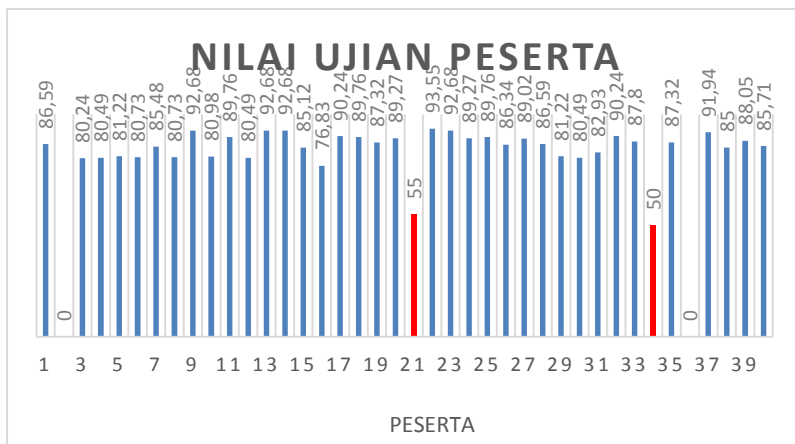
7. Pelatihan E-Learning Muatan Teknis Substansi Lembaga (MTSL)

- *Tingkat partisipasi :*

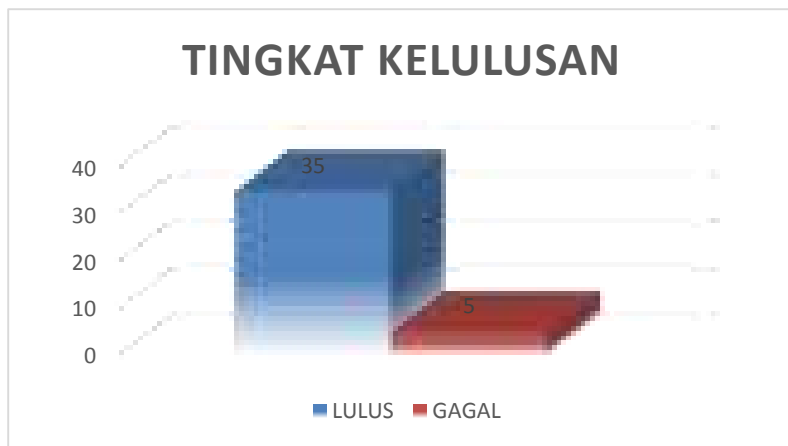




- Tingkat nilai ujian :

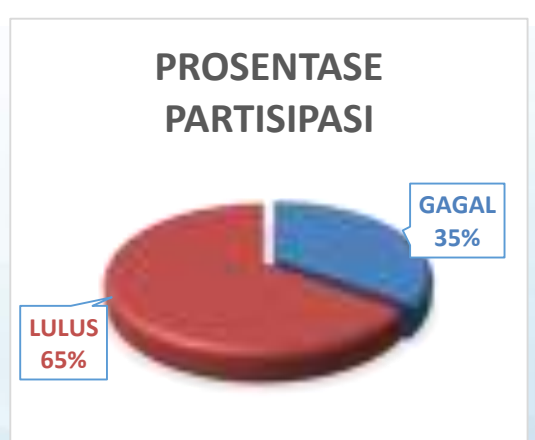
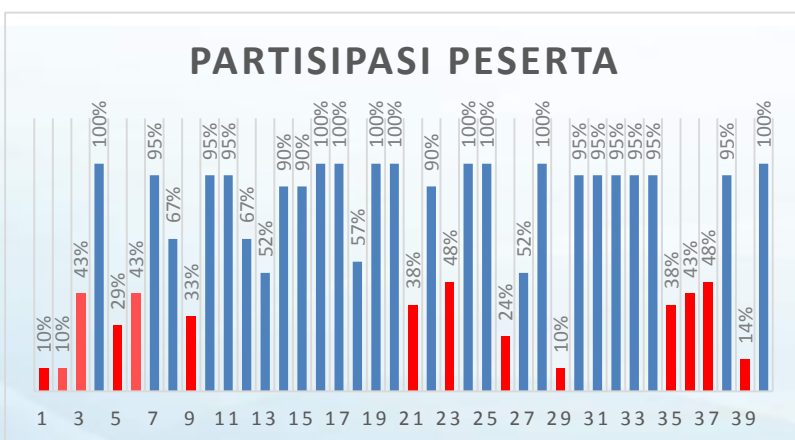


- Tingkat kelulusan :



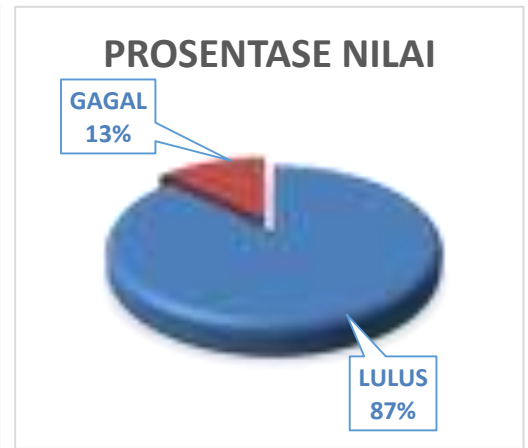
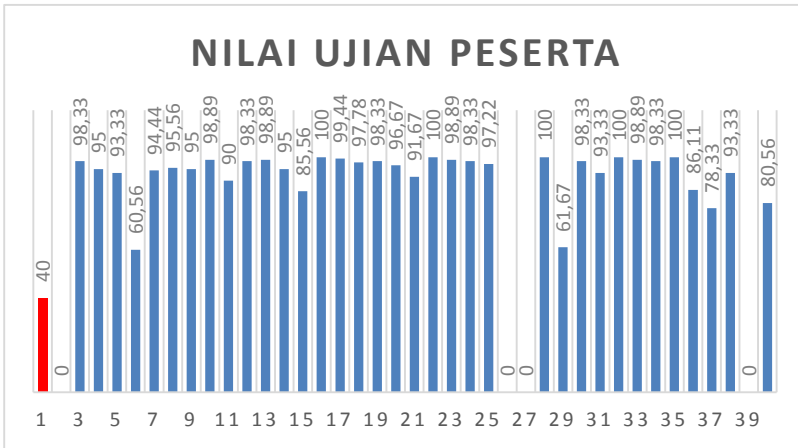
8. Pelatihan E-Learning Pelayanan Publik Tingkat Dasar (PPTD)

- Tingkat partisipasi :

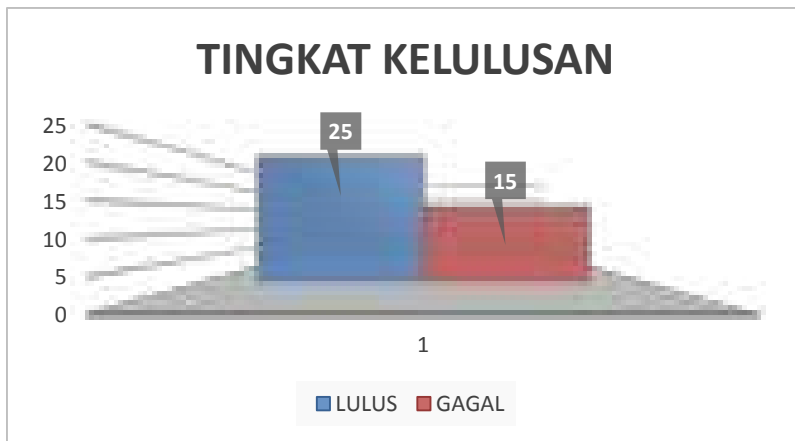




- *Tingkat nilai ujian :*

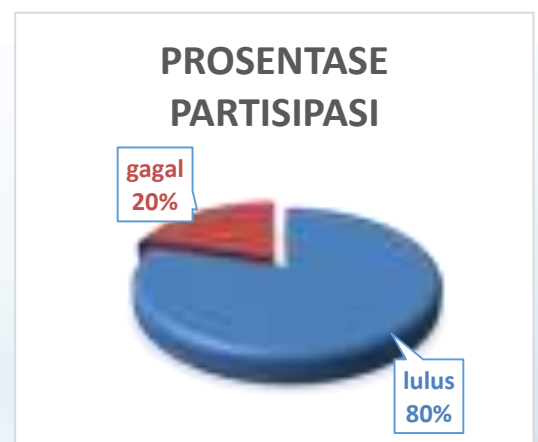
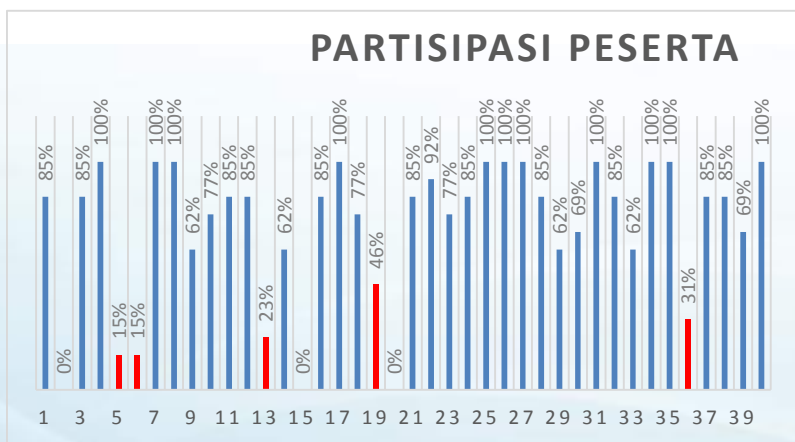


- *Tingkat kelulusan :*



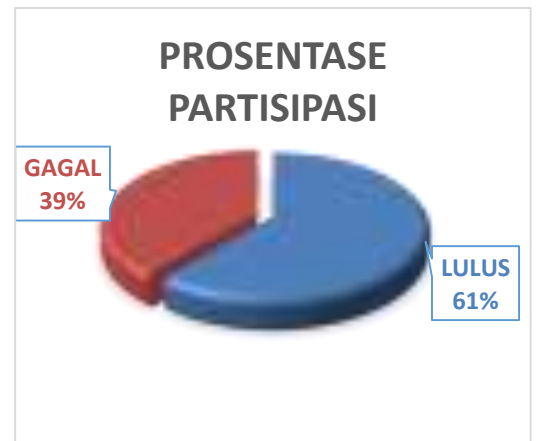
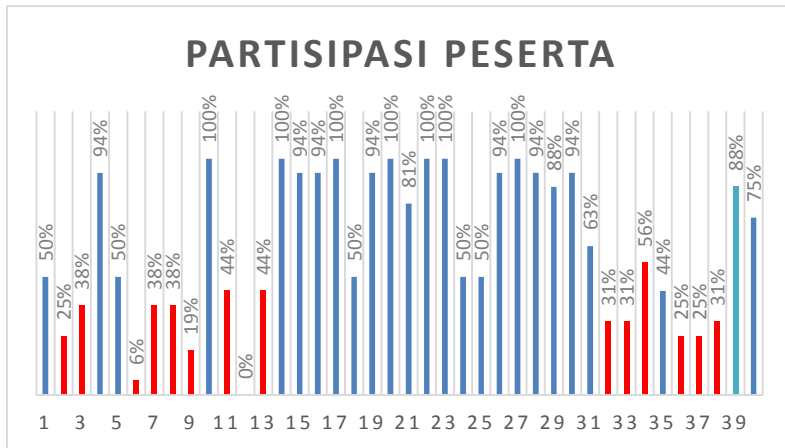
9. Pelatihan E-Learning Reformasi Birokrasi (RB)

- *Tingkat partisipasi (Angkatan I):*

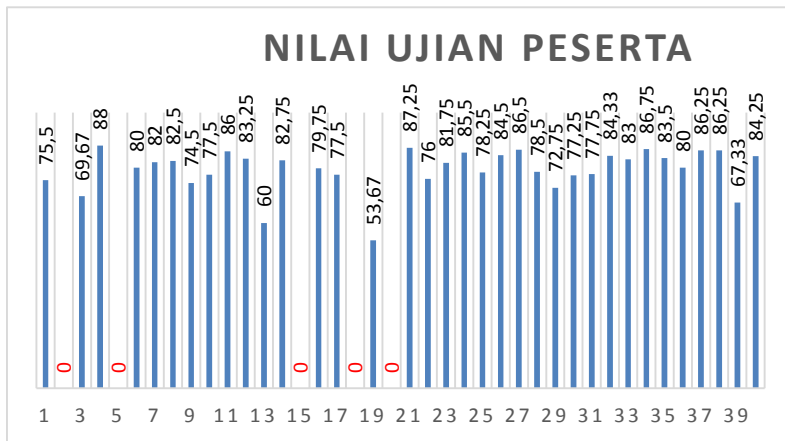




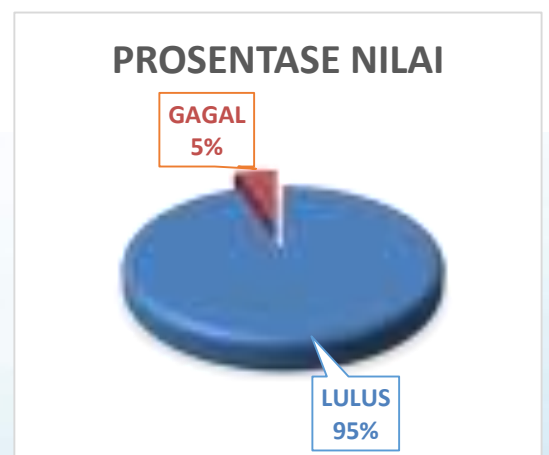
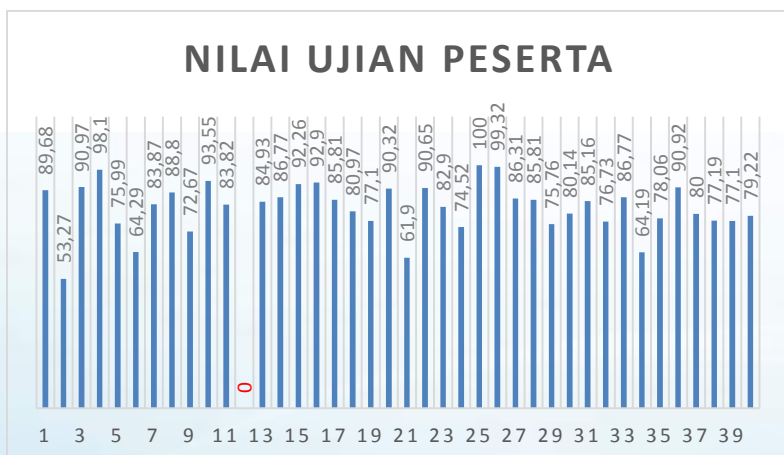
- *Tingkat partisipasi (Angkatan II):*



- *Tingkat nilai ujian (Angkatan I) :*

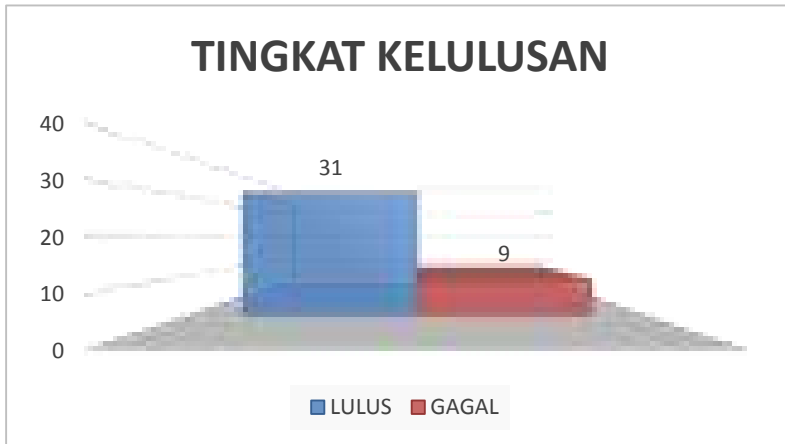


- *Tingkat nilai ujian (Angkatan II) :*





- *Tingkat kelulusan (Angkatan I) :*

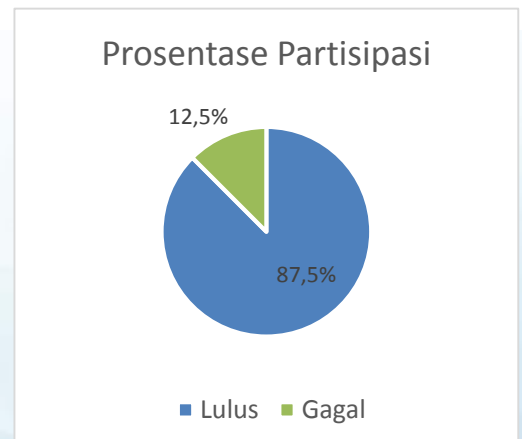
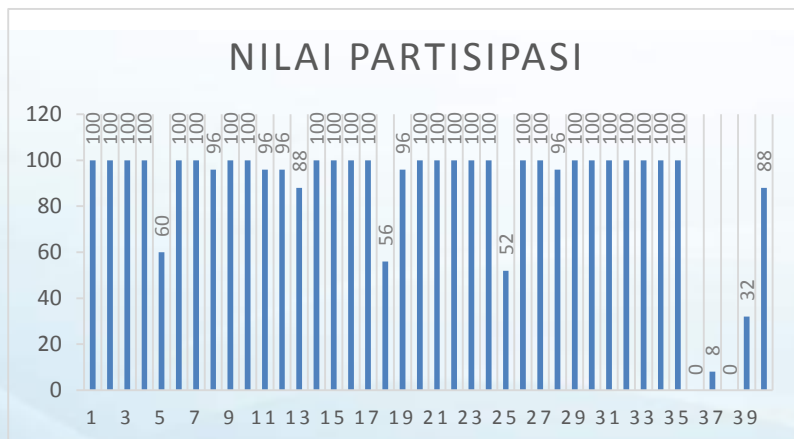


- *Tingkat kelulusan (Angkatan II) :*



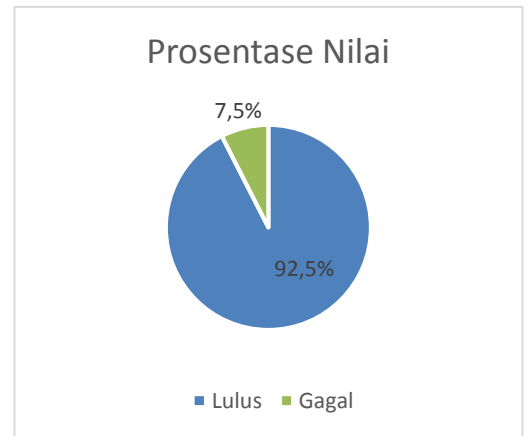
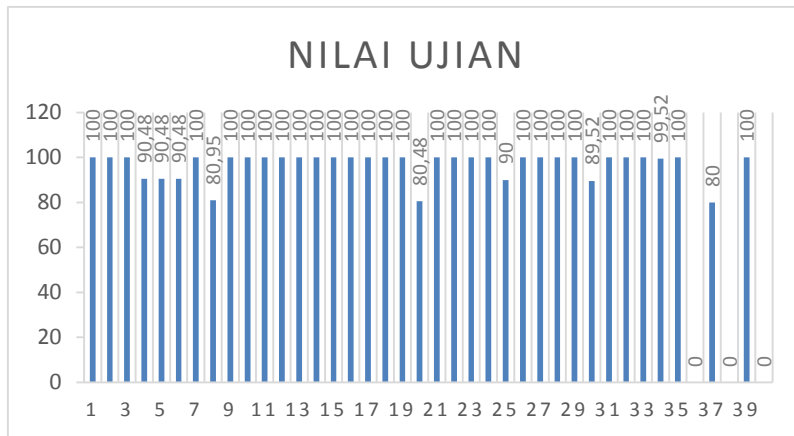
10. Pelatihan E-Learning Administrasi Perkantoran Tingkat Lanjutan (APTL)

- *Tingkat partisipasi :*

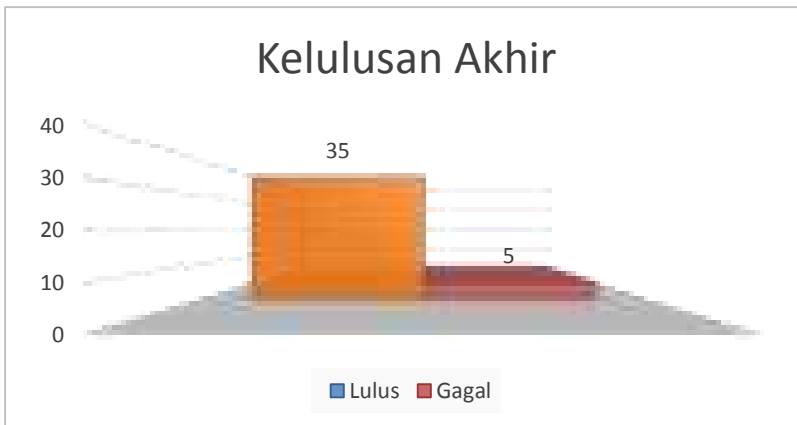




- *Tingkat nilai ujian :*

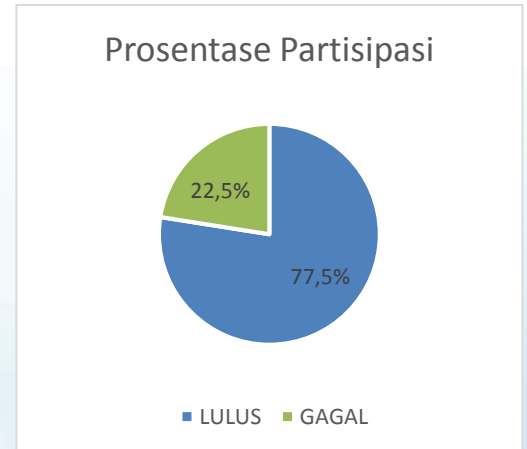
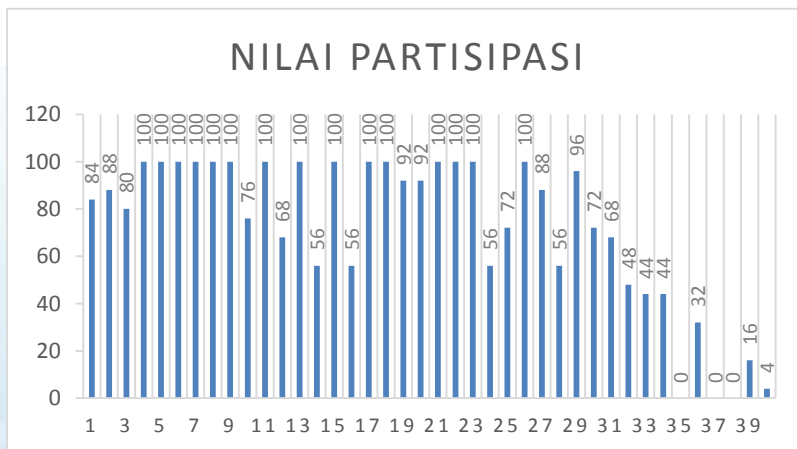


- *Tingkat kelulusan :*



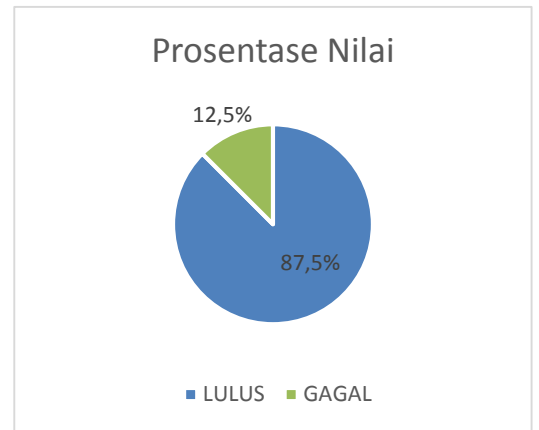
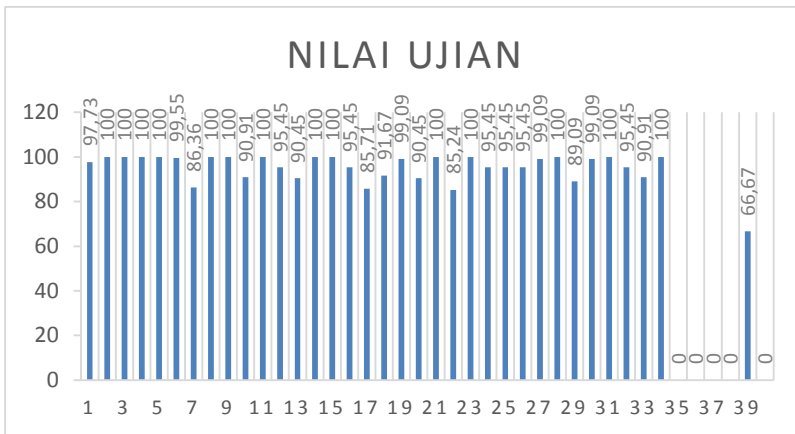
11. Pelatihan E-Learning Pelayanan Publik Tingkat Lanjutan (PPTL)

- *Tingkat partisipasi :*

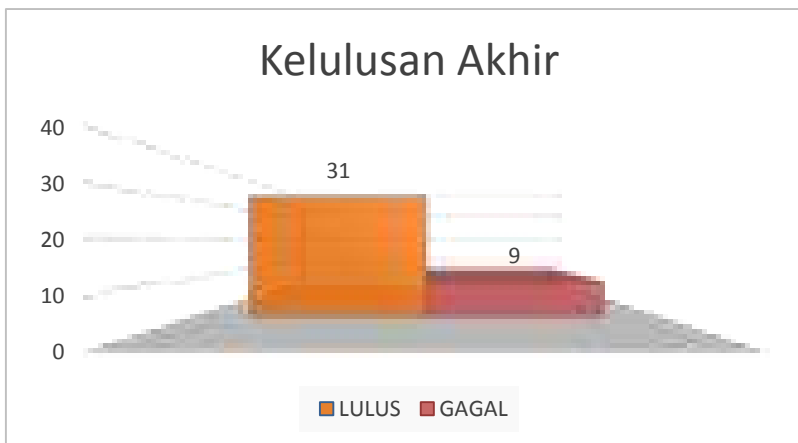




- *Tingkat nilai ujian :*

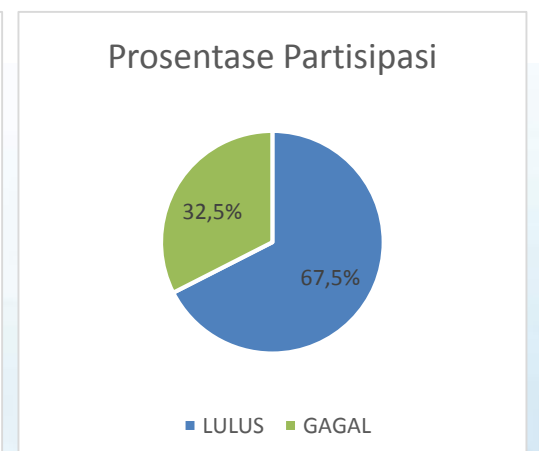
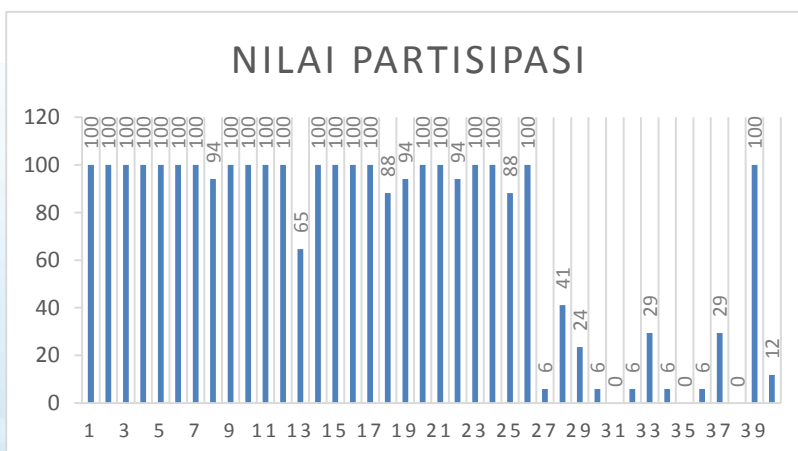


- *Tingkat kelulusan :*



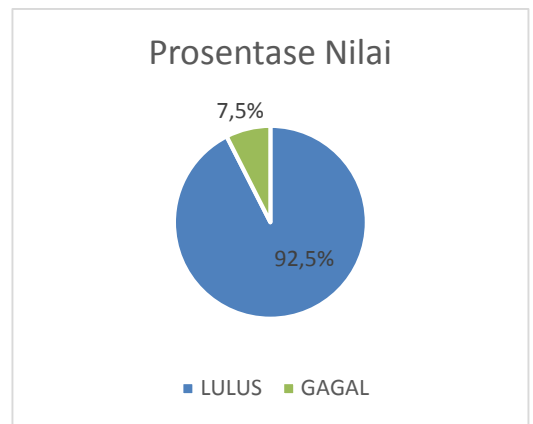
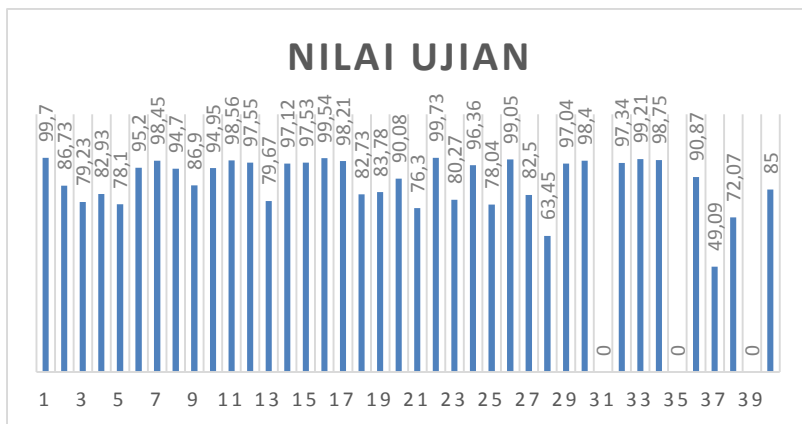
12. Pelatihan E-Learning Pengelolaan BMN

- *Tingkat partisipasi :*

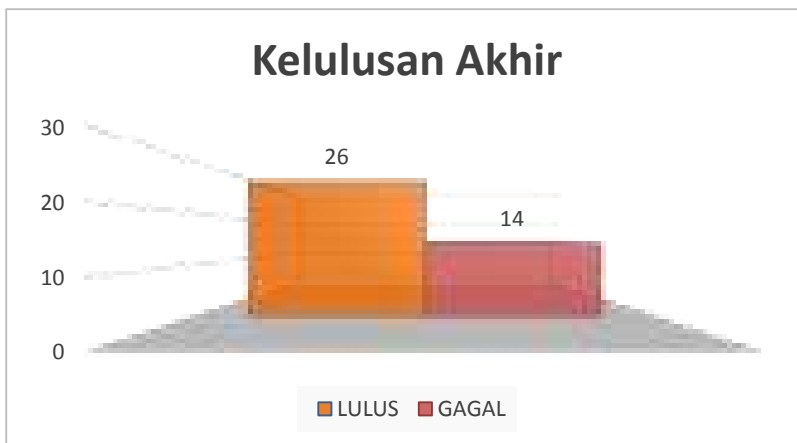




- *Tingkat nilai ujian :*



- *Tingkat kelulusan :*



b. Evaluasi Reaksi

Evaluasi dilakukan terhadap aspek pelaksanaan Diklat, meliputi proses belajar mengajar, peserta, kinerja tenaga pengajar, kurikulum, sarana prasarana, dan kinerja penyelenggara diklat. Metode pengumpulan penilaian ini dengan cara mengisi kuisisioner yang berisikan masukan serta saran dari Peserta. Hal ini sangat diperlukan agar kedepannya sebuah Diklat bisa menjadi lebih baik lagi dan untuk kepentingan bersama.

Dari hasil kuisisioner yang telah diisi oleh peserta tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta merasa puas atas penyelenggaraan diklat yang diadakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah, hal ini dibuktikan dengan presentasi hasil kuisisioner dengan skala linear 1 s.d 5, dimana 1 = Tidak Memuaskan, 2 = Kurang Memuaskan, 3 = Cukup Memuaskan, 4 = Memuaskan,

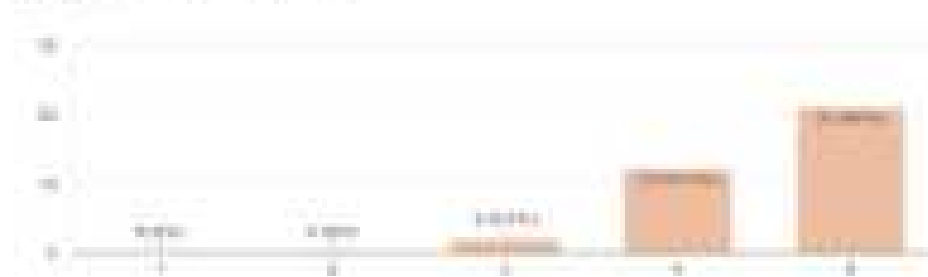


5= Sangat Memuaskan. Dari hasil tersebut banyak peserta yang memberikan penilaian pada angka 4 s.d 5 dalam Penyelenggaraan Kegiatan Diklat yang meliputi Program Diklat, Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan, Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan, Konsumsi, serta Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan.

Berikut adalah tanggapan dari para koresponden kuisioner Penyelenggraan Diklat P2U Angkatan I, II dan III :

✓ Program Diklat

1. Program Pelatihan Teknis Petugas Penta Utama pada Layanan dan Ruang yang dilakukan telah sesuai



2. Apakah masih diperlukan terhadap program Pelatihan (untuk diklat kelompok, studi kasus) yang diberikan oleh tenaga pengajar/kefyawanan

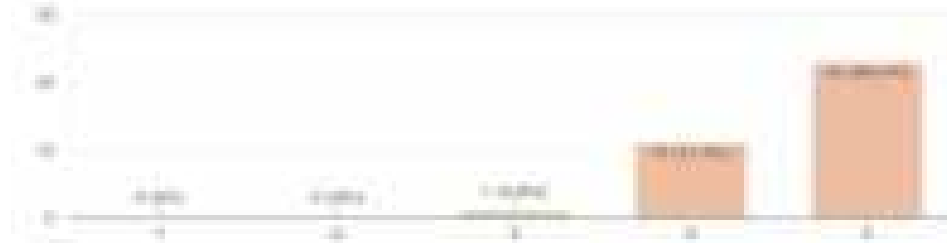




✓ Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan

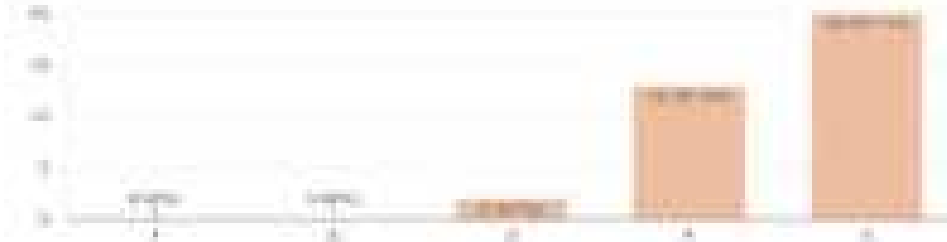
1. Penentuan pokok bahasan mata diklat (kegiatan apa) yang diberikan sebagai pengajaran/latihan yang

diutamakan



2. Isi materi setiap mata diklat (kegiatan apa)

diutamakan



3. Penyesuaian materi dengan isu-isu aktual

diutamakan



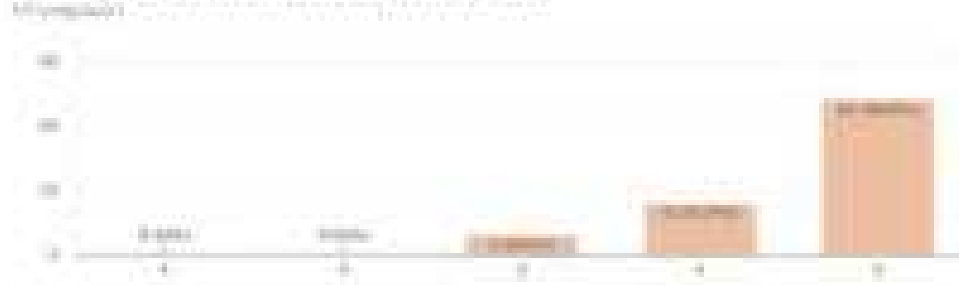


4. Penggunaan metode/teknik/ alat media/ alat yang dibutuhkan oleh tenaga pengajar/pendidik/peserta



✓ Pelayanan Pelatihan

1. Pelayanan administrasi dan staf/tenaga kerja



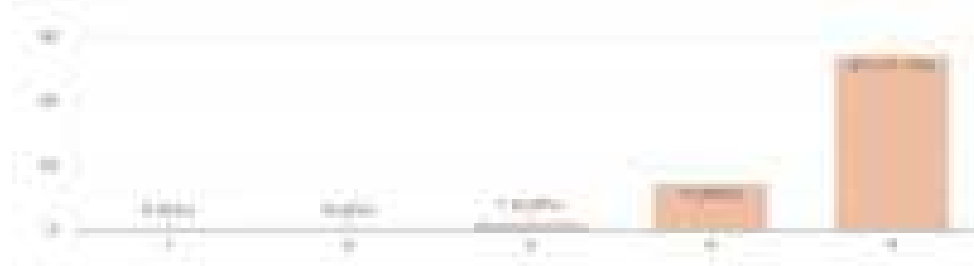
2. Pelayanan administrasi dan tenaga kerja





3. Pelaksanaan ketertarikan

Nilai (Rp)



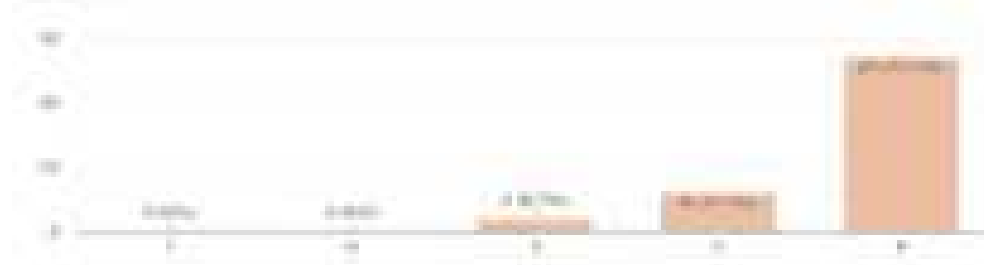
4. Pelaksanaan kesehatan/palidita

Nilai (Rp)



5. Biaya dan pertaksi petugas kelas serta peserta didik

Nilai (Rp)



6. Pelaksanaan pelatihan/palidita/kegiatan

Nilai (Rp)

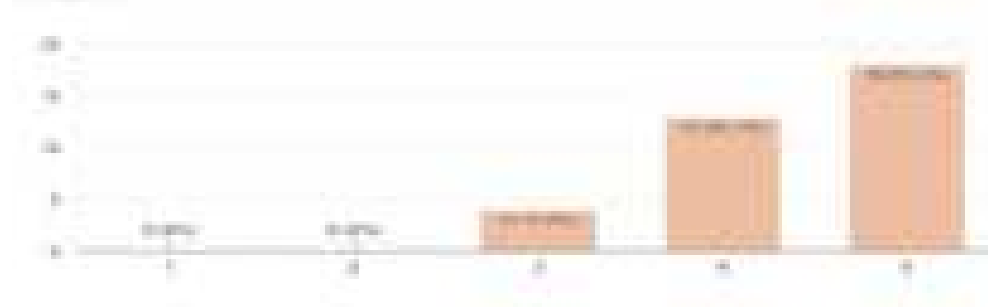




✓ Konsumsi

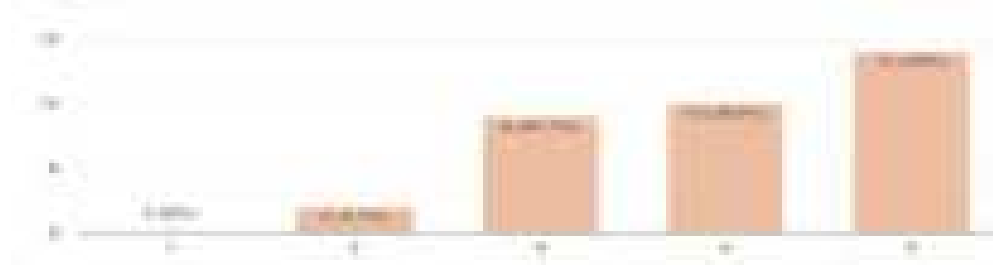
1. Pengeluaran untuk perjalanan dinas (asisten tetap)

(Rp.ribuan)



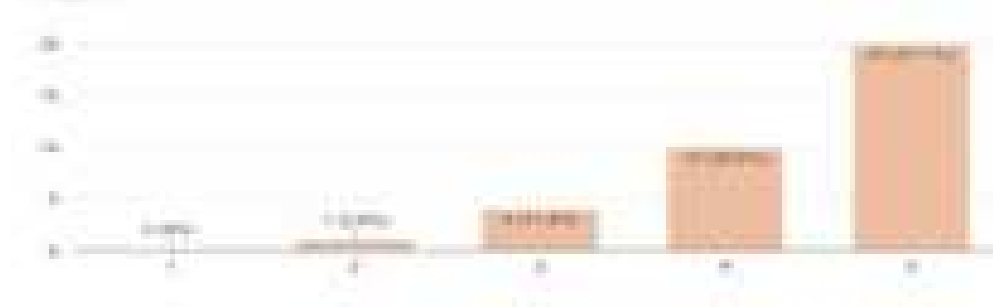
2. Biaya perjalanan dinas (asisten tetap) yang ditanggung

(Rp.ribuan)



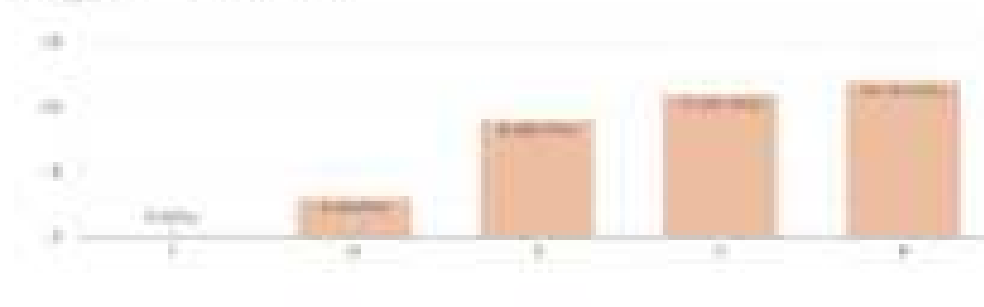
4. Pengeluaran untuk perjalanan dinas

(Rp.ribuan)



5. Biaya perjalanan dinas

(Rp.ribuan)





6. Jumlah siswa matkulper

14 orang



7. Kualitas pengajaran dan persiapan

14 orang



8. Ketamulhan siswa matkulper

14 orang



9. Keaktifan yang melain

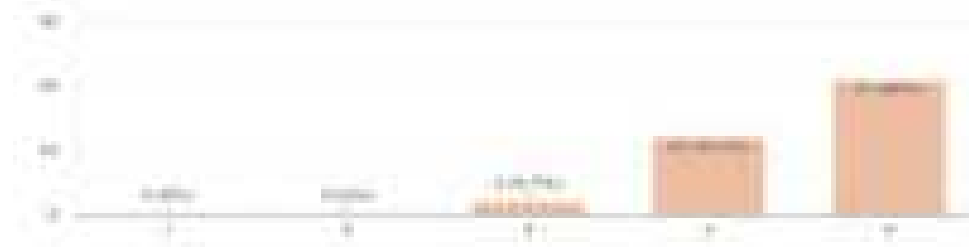
14 orang





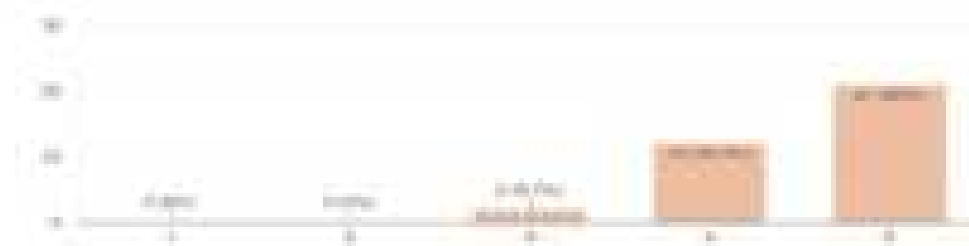
10. Keberhasilan penyelenggaraan

Manajemen



11. Ketepatan waktu dalam penyusunan dan pelaksanaan

Manajemen



✓ Fasilitas Pelatihan

1. Ruang kelas

Manajemen



2. Ruang kelengkapan sarana penunjang/pembelajaran

Manajemen





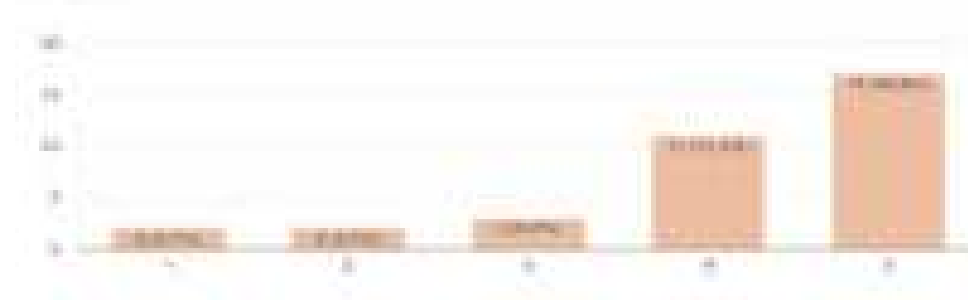
3. Fasilitas dan ketertarikan ruang kelas

100 orang



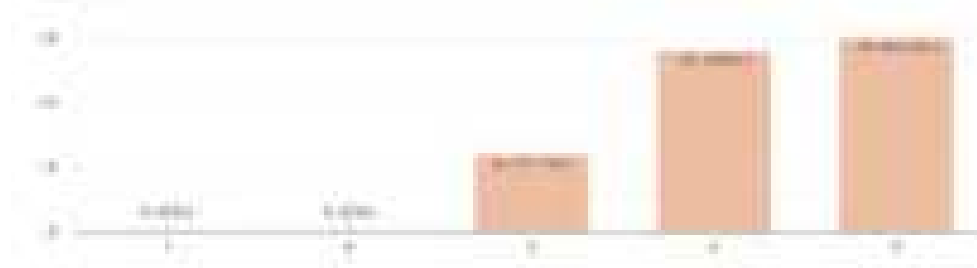
4. Fasilitas internet

100 orang



5. Fasilitas pemrosesan multimedia dan ketertarikan alat-alat

100 orang



6. Ruang tidur dan ketertarikan ruang

100 orang





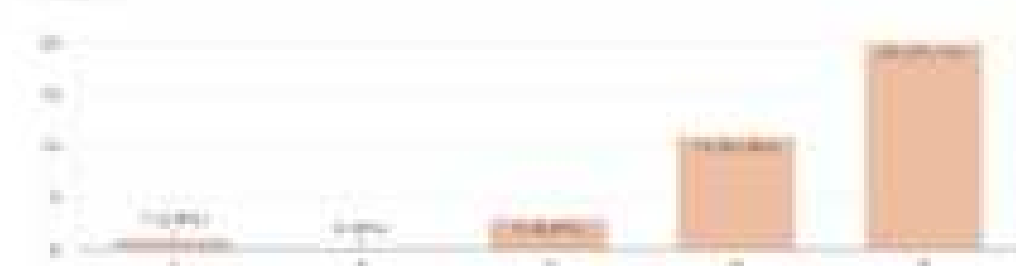
P. Fasilitas Internet

(Monev internal)



R. Fasilitas pelatihan

(Monev internal)



S. Fasilitas sumber sumber/teknik

(Monev internal)





PROGRAM 2 : TERSEDIAANYA LAYANAN INTERNAL DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER

Pada program kegiatan ini terdapat beberapa *sub output* antara lain :

1. Penyusunan rancangan program dan penyusunan rencana anggaran
2. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
3. Pengelolaan keuangan
4. Pengelolaan kepegawaian
5. Pelayanan umum dan perlengkapan
6. Administrasi pengadaan barang dan jasa

Dari beberapa *sub output* tersebut telah dilaksanakan 1 (satu) kegiatan yang menunjang pengembangan kompetensi yaitu dengan diadakannya *Workshop* Diseminasi Pengelolaan Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2019.

Workshop Diseminasi Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Kegiatan ini merupakan kolaborasi Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah dengan Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Hukum dan HAM RI yang diikuti oleh 40 peserta dari 9 (sembilan) kantor wilayah di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah. Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini ialah untuk mengajak seluruh peserta diseminasi supaya pelaksanaan pengadaan barang/jasa bisa lebih baik dan lebih berorientasi pada hasil, tidak hanya berorientasi pada prosedur. Selain itu kegiatan ini juga memberikan penguatan dengan adanya simulasi atau praktik pelatihan aplikasi LPSE yang diakses secara online sehingga diharapkan mampu meningkatkan transparansi dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.



Praktik pelatihan (simulasi) pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara online melalui aplikasi LPSE oleh Pejabat Pelaksana Pusdatin, DS Fashih Pambudi.

Hasil capaian kegiatan *Workshop* Diseminasi Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM :

Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Keterangan	Kendala
2	3		4	5
Diseminasi Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	10-12 April 2019	Hotel GETS Semarang	1. Terselenggaranya kolaborasi dengan Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Hukum dan HAM serta terlaksananya kegiatan tersebut dengan baik yang diikuti oleh pelaksana dari Biro Pengelolaan BMN, para Pejabat Pengadaan/Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada kantor wilayah di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan	-



			<p>HAM Jawa Tengah, serta pelaksana Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah.</p> <p>2. Diperoleh materi mengenai konsep transformasi ULP menjadi UKPBJ di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan praktik pelatihan/simulasi pengadaan barang/jasa menggunakan aplikasi SPSE versi 4.3 melalui website LPSE Kemenkumham.</p>	
--	--	--	--	--

PROGRAM 3 : TERSELENGGARANYA LAYANAN GAJI DAN PERKANTORAN

Pada program kegiatan ini terdapat 2 (dua) *sub output*, di antaranya :

1. Gaji dan Tunjangan
2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Perbandingan Capaian Kinerja

Berikut kami sampaikan perbandingan capaian kinerja Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah TA 2018 dengan TA 2019 :

Sasaran Strategis	IKU	2018			2019		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kompetensi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah lulusan yang mengikuti diklat berbasis kompetensi di Kantor Wilayah	200 orang	201 orang	100,01	1.286 orang	1.289 orang	100,23
	Tersedianya layanan internal dukungan manajemen satker	1 layanan	1 layanan	100,00	1 layanan	1 layanan	100,00
	Terselenggaranya layanan gaji dan perkantoran	1 layanan	1 layanan	100,00	1 layanan	1 layanan	100,00

Dari data di atas dapat diketahui bahwa pada TA 2019 terjadi peningkatan capaian kinerja pada indikator Jumlah lulusan yang mengikuti diklat berbasis kompetensi di Kantor Wilayah yang menunjukkan bahwa kinerja Balai Diklat dalam menyelenggarakan kegiatan diklat meningkat dibandingkan TA 2018. Hal ini terlihat dari capaian realisasi meningkat sebesar 0,22 % dan jumlah lulusan diklat yang jauh lebih banyak dibanding tahun 2018 yaitu sebanyak 1.289 orang.



B. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Penyerapan anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah untuk Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM untuk Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	Pagu 2019 (Rp)	Penyerapan 2019 (Rp)	Capaian Penyerapan %
5249	<i>Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah</i>	12.014.468.000		
5249.001	<i>Penyelenggaraan Diklat Aparatur pada Balai Diklat Hukum dan HAM</i>	10.112.909.000	9.003.598.352	89,02
5249.100	<i>Dukungan Manajemen Satker Balai Diklat Hukum dan HAM</i>	196.690.000	191.973.000	97,60
5249.994	<i>Layanan Perkantoran</i>	1.704.869.000	1.681.220.013	98,61
	Jumlah	12.014.468.000	10.876.791.365	90,53

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa total pagu anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp 12.014.468.000. Dalam pelaksanaan kegiatan di Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2019 telah menyerap anggaran senilai total Rp 10.876.791.365 atau sebesar 90,53% dari total anggaran.



Rincian capaian penyerapan anggaran untuk masing-masing kegiatan diklat pada Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Sasaran	Program	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Penyerapan (Rp)	Capaian %
Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia	Diklat Teknis	Pelatihan Teknis Pengamanan bagi Petugas Pintu Utama (P2U) pada Lapas dan Rutan Angkatan I-III TA 2019	744.866.000	731.567.246	98,21
		Pelatihan Teknis Pengawasan Keimigrasian Angkatan I-II TA 2019	548.516.000	541.829.948	98,78
		Pelatihan untuk Pelaksana pada Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat Angkatan I-II TA 2019	303.201.000	299.199.031	98,68
		Pelatihan Teknis bagi Kepala Regu Pengamanan pada Lapas dan Rutan Angkatan I-II TA 2019	480.498.000	477.941.104	99,47
		Pelatihan Bendahara Pengeluaran Angkatan I-II TA 2019	444.274.000	438.654.890	98,74
		Pelatihan Pelayanan Publik Angkatan I-II TA 2019	325.001.000	314.080.200	96,64
		Pelatihan E-Learning Administrasi Perkantoran Tingkat Dasar (APTD)	8.000.000	5.200.000	65,00



		Pelatihan E-Learning Muatan Teknis Substansi Lembaga (MTSL)	14.000.000	5.650.000	40,36
		Pelatihan E-Learning Pelayanan Publik Tingkat Dasar (PPTD)	8.000.000	4.400.000	55
		Pelatihan E-Learning Reformasi Birokrasi (RB)	14.000.000	10.000.000	71,43
		Pelatihan E-Learning Administrasi Perkantoran Tingkat Lanjutan (APTL)	7.000.000	5.000.000	71,43
		Pelatihan E-Learning Pelayanan Publik Tingkat Lanjutan (PPTL)	7.000.000	4.750.000	67,86
		Pelatihan E-Learning Pengelolaan BMN	14.000.000	5.000.000	35,71
	Diklat Kepemimpinan	Pelatihan Dasar CPNS 506 orang	7.194.553.000	6.159.125.933	85,61



Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Keuangan

Berikut kami sampaikan perbandingan capaian kinerja keuangan TA 2018 dengan TA 2019

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	2018			2019		
	Pagu (Rp)	Penyerapan (Rp)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Penyerapan (Rp)	Capaian (%)
<i>Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah</i>	1.276.526.000			12.014.468.000		
<i>Penyelenggaraan Diklat Aparatur pada Balai Diklat Hukum dan HAM</i>	843.381.000	820.941.661	97,34	10.112.909.000	9.003.598.352	89,02
<i>Dukungan Manajemen Satker Balai Diklat Hukum dan HAM</i>	62.940.000	56.508.547	97,82	196.690.000	191.973.000	97,60
<i>Layanan Perkantoran</i>	370.205.000	265.311.660	71,67	1.704.869.000	1.681.220.013	98,61
Jumlah	1.276.526.000	1.142.761.868	89,52	12.014.468.000	10.876.791.365	90,53

Dari data di atas dapat diketahui bahwa kinerja keuangan Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah TA 2019 mengalami peningkatan dibanding TA 2018 dibuktikan dengan capaian kinerja TA 2019 sebesar 90,53% dan TA 2018 sebesar 89,52%. Artinya pada TA 2019 terjadi peningkatan capaian kinerja keuangan sebesar 1,01% yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada TA 2019 lebih baik dibanding tahun sebelumnya.



BAB IV
PENUTUP



A. Kesimpulan

Dari hasil pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian kegiatan program pendidikan dan pelatihan aparatur Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

Sasaran	Program	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
<i>Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia</i>	Diklat Teknis dan Kepemimpinan	Pelatihan Teknis Pengamanan bagi Petugas Pintu Utama (P2U) pada Lapas dan Rutan Angkatan I-III TA 2019	120 orang	120 orang	100
		Pelatihan Teknis Pengawasan Keimigrasian Angkatan I dan II TA 2019	80 orang	80 orang	100
		Pelatihan untuk Pelaksana pada Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat Angkatan I dan II TA 2019	60 orang	58 orang	96,67
		Pelatihan Teknis bagi Kepala Regu Pengamanan pada Lapas dan Rutan Angkatan I dan II TA 2019	80 orang	80 orang	100
		Pelatihan Bendahara Pengeluaran Angkatan I-II TA 2019	60 orang	65 orang	100
		Pelatihan Pelayanan Publik Angkatan I-II TA 2019	60 orang	60 orang	100
		Pelatihan E-Learning Administrasi Perkantoran Tingkat Dasar (APTD)	40 orang	40 orang	100
		Pelatihan E-Learning Muatan Teknis Substansi Lembaga (MTSL)	40 orang	40 orang	100



	Pelatihan E-Learning Pelayanan Publik Tingkat Dasar (PPTD)	40 orang	40 orang	100
	Pelatihan E-Learning Reformasi Birokrasi (RB)	80 orang	80 orang	100
	Pelatihan E-Learning Administrasi Perkantoran Tingkat Lanjutan (APTL)	40 orang	40 orang	100
	Pelatihan E-Learning Pelayanan Publik Tingkat Lanjutan (PPTL)	40 orang	40 orang	100
	Pelatihan E-Learning Pengelolaan BMN	40 orang	40 orang	100
	Pelatihan Dasar CPNS	560 orang	560 orang	100
Dukungan Manajemen Satker	-	1 layanan	1 layanan	100
Gaji dan Layanan Perkantoran	-	1 layanan	1 layanan	100

2. Capaian kinerja keuangan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

	<i>Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM</i>	<i>Pagu 2019 (Rp)</i>	<i>Penyerapan 2019 (Rp)</i>	<i>Capaian Penyerapan %</i>
5249	<i>Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah</i>	12.014.468.000		
5249.001	<i>Penyelenggaraan Diklat Aparatur pada Balai Diklat Hukum dan HAM</i>	10.112.909.000	9.003.598.352	89,02
5249.100	<i>Dukungan Manajemen Satker Balai Diklat Hukum dan HAM</i>	196.690.000	191.973.000	97,60
5249.994	<i>Layanan Perkantoran</i>	1.704.869.000	1.681.220.013	98,61
	Jumlah	12.014.468.000	10.876.791.365	90,53



3. Dari seluruh kegiatan pada program pendidikan dan pelatihan aparatur Kementerian Hukum dan HAM pada Tahun 2019 terdapat 1 (satu) kegiatan pelatihan yang indikator kerjanya tidak mencapai hasil yang maksimal (100%) yaitu :

Program	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
<i>Program pelatihan teknis</i>	Pelatihan untuk Pelaksana pada Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat Angkatan I dan II TA 2019	60 orang	58 orang	96,67

4. Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2019 adalah tidak tercapainya target peserta diklat Pelatihan untuk Pelaksana pada Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat TA 2019 (yang ditargetkan 60 peserta namun yang tercapai hanya 58 peserta).
5. Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja keuangan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2019 adalah tidak maksimalnya penyerapan anggaran pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 10.876.791.365 dari total pagu Rp 12.041.468.000 dengan persentase penyerapan sebesar 90,53%. Hal ini disebabkan karena ABT Pelatihan Dasar CPNS turun setelah Pelatihan Dasar tersebut dilaksanakan sehingga membatasi hal-hal sebagai berikut :
- Penggantian penunjukan mentor atasan langsung peserta digantikan oleh mentor pengganti pada kantor wilayah/UPT dalam kota tempat penyelenggaraan Latsar CPNS untuk menghemat biaya pelaksanaan Latsar CPNS;
 - Biaya pengadaan perlengkapan peserta Latsar CPNS diminimalisir serendah mungkin;
 - Biaya pelaksanaan Latsar CPNS diminimalisir untuk menghemat biaya penyelenggaraan Latsar CPNS;
 - Biaya Perjalanan Peserta dengan transportasi udara tidak dimaksimalkan sesuai dengan SBM dengan mengeluarkan edaran untuk menggunakan maskapai yang terefisien.



B. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut maka perlu adanya tindak lanjut terhadap hambatan/permasalahan yang ada, yaitu :

1. Berkomunikasi dengan peserta guna memastikan kehadirannya sehingga apabila ada halangan dari calon peserta maka panitia bisa segera berkoordinasi dengan Kantor Wilayah atau Unit Pelaksana Teknis untuk segera dicarikan penggantinya.
2. Berkoordinasi dengan BPSDM dan mempersiapkan langkah-langkah yang diambil apabila terjadi hal sama terkait anggaran ABT Pelatihan Dasar CPNS sehingga penyerapan anggaran dapat dimaksimalkan.